



Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2022 Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal 27 Januari 2022. Terdapat 12

(dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan capaian kinerja Tahunan 2022 ini berisi progres pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud dari periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputi SD Maritim pada Tahun 2022.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan 2022 ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Capaian Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, 10 Februari 2023
Plt. Deputy Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,



Mochammad Firman Hidayat, SE.,MA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA KINERJA	7
2.1. Sasaran Strategis (SS)	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja	9
2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	9
2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja	11
2.2.3 Kegiatan dan Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	1
3.1.1 <i>Stakeholder Perspective</i>	1
3.1.2 <i>Customer Perspective</i>	4
3.1.3 <i>Internal Business Perspective</i>	15
3.1.4 <i>Learning and Growth</i>	69
3.2. Realisasi Anggaran	72
BAB IV PENUTUP	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2
Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024	8
Gambar 3. Grafik Rata-Rata NTN 2010-2022	8
Gambar 4. Grafik Produksi Perikanan Tangkap 2010-2022 (Ton)	9
Gambar 5. Panduan Perizinan Usaha Tambak Udang	17
Gambar 6. Standar lengkap pelabuhan perikanan (PP) yaitu tersedianya listrik, air bersih, TPI, BBM, dan Cold Storage/Pabrik Es. Dari 538 PP, hanya 11% yang bersarpras lengkap.	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2022	9
Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2022	10
Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	15
Tabel 4. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2022	16
Tabel 5. Alokasi Pagu Efektif Final TA 2022.....	17
Tabel 6. Perhitungan IKLI Tahun 2022	2
Tabel 7. Nilai Tukar Nelayan TA 2022	8
Tabel 8. Tabel Produksi Perikanan Tangkap.....	8
Tabel 9. Perhitungan IKLI Tahun 2022	36
Tabel 10. Volume dan Nilai Ekspor Menurut Komoditas Utama Tahun 2017-2021	44
Tabel 11. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	72



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 12 (duabelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan SS dan IKU menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dengan 4 (empat) perspektif yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business

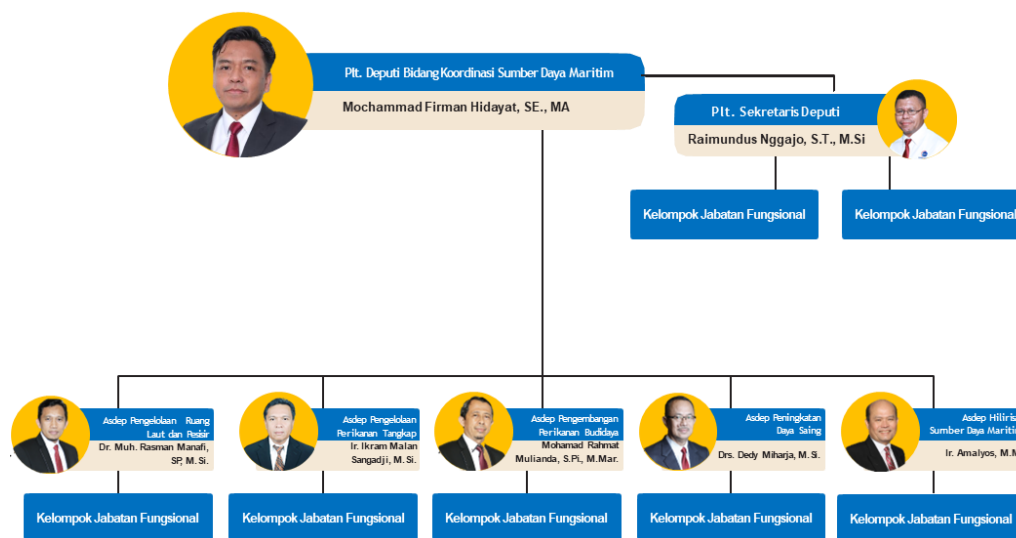
Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Target waktu capaian PK Deputy SD Maritim ditetapkan pada Triwulan III dan IV (TW III dan IV).

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputy SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja dipimpin oleh satu orang Deputy dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan. Struktur organisasi Deputy SD Maritim hingga 31 Desember 2022, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk

kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;
- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;

- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sekretaris Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

RENCANA KINERJA

2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

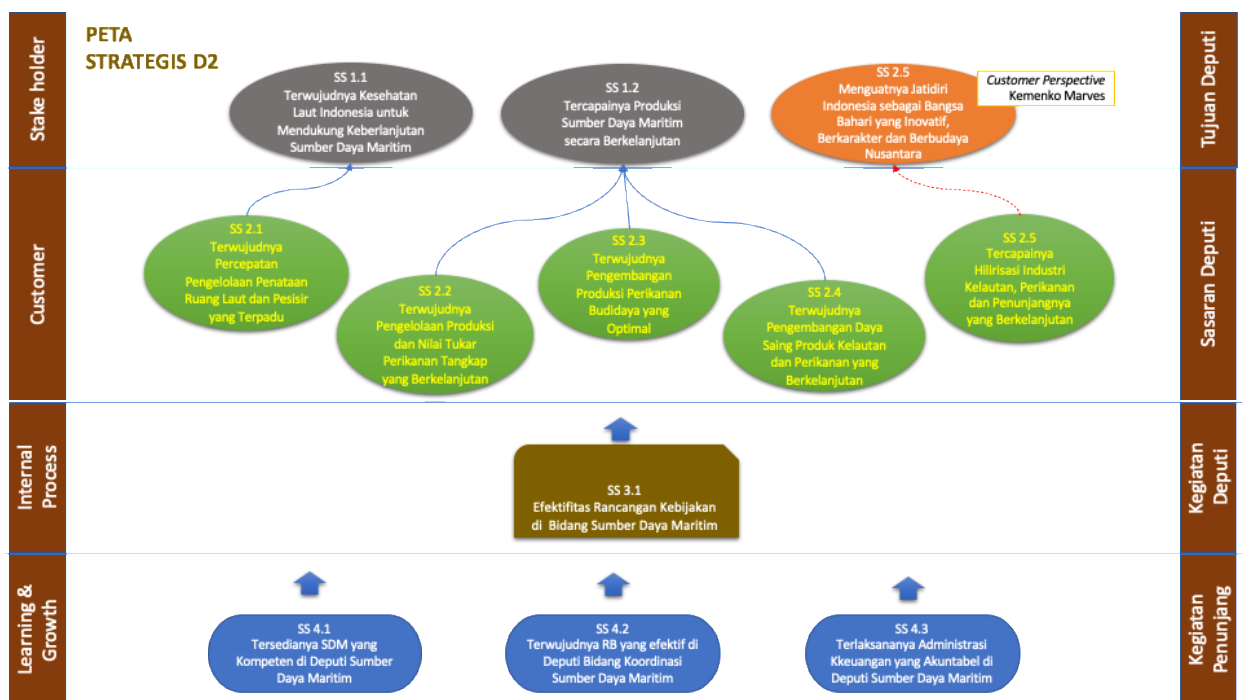
1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.
- 2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputi: “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” adalah turunan untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”.



Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputi SD Maritim tahun 2022 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2022

<i>Stakeholder</i>	
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan
<i>Customer</i>	
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal
SS.6	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
SS.7	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan
<i>Internal Business Process</i>	
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
<i>Learning and Growth</i>	
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel

2.2. Indikator dan Target Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator

Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim	1	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	76
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	2	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	80%
Customer Perspective				
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	3	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	80%
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	4	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	80%
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	5	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	80%
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	6	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	80%
SS.7	Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	7	Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	80%
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	8	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	95%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	75
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi	90%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
			Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	97

2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja

- IKU.1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia.** Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI.

Formula:

IKLI Agregat = Nilai Variabel IKLI Tujuan 1 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 2 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 5 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 6 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 7 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 8 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 9 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 10

- IKU.2 Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2022 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2022. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022)}}{\text{(Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 + Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022)}} + \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}} \times 100\%$$

2

- IKU.3 Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu.** Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu merupakan rata-rata dari capaian rencana zonasi yang diselesaikan, capaian IKLI pada Tahun 2022, dan capaian luas kawasan konservasi

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Capaian Jumlah RZ Tahun 2022}}{\text{Target Jumlah RZ Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian IKLI Tahun 2022}}{\text{Target IKLI Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Tahun 2022}}{\text{Target Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Tahun 2022}}}{3} \times 100\%$$

4. **IKU.4 Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022 dengan target produksi perikanan tangkap tahun 2022 ditambahkan ratio capaian Nilai Tukar Nelayan 2022 dengan target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2022. Target dimaksud merujuk pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022}} + \frac{\text{Jumlah Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022}}}{2} \times 100\%$$

5. **IKU.5 Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal.** Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal merupakan perbandingan antara capaian volume produksi perikanan budidaya pada Tahun 2022 yang dicapai dengan target yang ditetapkan pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022}}{\text{Target Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022}} \times 100\%$$

6. **IKU.6 Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan.** Daya Saing Produk Kelautan Perikanan adalah suatu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dalam meningkatkan daya saing usaha hasil perikanan dengan pengefesiensian usaha, mutu dan keamanan produk dalam melakukan inovasi dalam pemasaran produk perikanan yang ditetapkan pada RKP 2022.

Formula:

Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022

x 100%

Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022

7. **IKU.7 Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan.** Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan persentase akumulasi capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibandingkan dengan target Tahun 2022 pada Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020-2024.

Formula:

$$\left(\frac{\text{Capaian Ketersediaan Inovasi Teknologi Industri Pergaraman untuk Mendukung Produksi Pergaraman Nasional 2022}}{\text{Target Ketersediaan Inovasi Teknologi Industri Pergaraman untuk Mendukung Produksi Pergaraman Nasional 2022}} + \frac{\text{Capaian Pelaku atau Kelompok yang Terfasilitasi Tahun 2022}}{\text{Target Pelaku atau Kelompok yang Terfasilitasi Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian Jumlah Riset yang dimanfaatkan industri KP Tahun 2022}}{\text{Target Jumlah Riset yang dimanfaatkan industri KP tahun 2022}} \right) \times 100\%$$

8. **IKU.8 Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan kebijakan.

Formula:

Jumlah Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti

x 100%

Total Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim

9. **IKU.9 Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan

rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan rekomendasi kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$$

10. **IKU.10 Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi** Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi dihitung berdasarkan dari perbandingan antara Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah memenuhi kompetensi dengan total Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kompetensi yang dimaksud disini adalah yang disesuaikan antara latar pendidikan dengan jabatan yang diduduki.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang sesuai kompetensi}}{\text{Total SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

11. **IKU.11 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.** Nilai Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Formula:

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

12. IKU.12 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPRB}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPRB}} \times 100\%$$

13. IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagiham, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D

Formula:

Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

2.2.3 Kegiatan dan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Sumber Daya Maritim sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 17 November 2021. Dalam mendukung capaian SS Deputi SD Maritim terdapat 7 (enam) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17.226.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan kepada setiap K/L Nomor: S-1088/MK.02/2021 dan Nomor: S-458/MK.02/2022, pada Tahun 2022 diberlakukan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga sebagai langkah mitigasi terhadap dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan anggaran efektif Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-	Rp359.248.000,-	Rp3.140.752.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-	Rp338.377.000,-	Rp2.461.623.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-	Rp324.074.000,-	Rp2.375.926.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-	Rp297.200.000,-	Rp1.952.800.000,-
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-	Rp300.639.000,-	Rp1.949.361.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-	Rp136.108.000,-	Rp1.390.882.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp208.884.000,-	Rp1.991.116.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-	Rp. 1.964.530.000,-	Rp15.262.460.000

Pada Tahun 2022 terdapat penggeseran anggaran dan serta pembukaan akun blokir guna optimalisasi kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TA 2022. Berikut adalah alokasi final anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TA 2022:

Tabel 5. Alokasi Pagu Efektif Final TA 2022

NO	KEGIATAN	PAGU EFEKTIF SETELAH BLOKIR	PERGESERAN ANGGARAN	PAGU SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	PEMBUKAAN BLOKIR AA	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	3.140.752.000	- 50.000.000	3.090.752.000		3.090.752.000
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.461.623.000	- 80.000.000	2.381.623.000		2.381.623.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	2.375.926.000	- 50.000.000	2.325.926.000		2.325.926.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	1.952.800.000	130.000.000	2.082.800.000		2.082.800.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	1.949.361.000	- 50.000.000	1.899.361.000		1.899.361.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	1.390.882.000	100.000.000	1.490.882.000	1.900.000.000	3.390.882.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	1.991.116.000		1.991.116.000		1.991.116.000
	JUMLAH ANGGARAN	15.262.460.000		15.262.460.000	1.900.000.000	17.162.460.000



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK Deputy SD Maritim untuk seluruh IKU ditargetkan pada Triwulan III dan IV. Berikut adalah capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TA 2022 sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan pada PK Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2022:

3.1.1 Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis Satu (SS.1) adalah **“Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Indeks Kesehatan Laut Indonesia***.

SS.1 ini akan mendukung SS.7 Indikator.7 pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di *Customer Perspective* yang adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia dengan indikator juga Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Kesehatan Laut Indonesia adalah kondisi dimana laut Indonesia terjaga sehingga dapat bermanfaat sebagai produsen oksigen, pengaturan iklim, tempat sumber makanan, tempat hidup keanekaragaman hayati dan serta tempat sumber ekonomi. Mendukung

Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah sebuah kondisi dimana kualitas laut Indonesia dapat menunjang pengelolaan dan serta pemanfaatan Sumber Daya Maritim.

Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia yang baik sehingga dapat menunjang pemanfaatan Sumber Daya Maritim. Indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI) merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut Indonesia yang pengukurannya diadopsi dari ocean health index (OHI). Capaian nilai IKLI pada tahun 2021 adalah 76,76. Berdasarkan dari capaian nilai tersebut, target dari IKLI untuk tahun 2022 adalah 76.

Indeks Kesehatan Laut Indonesia dihitung berdasarkan dari hasil akhir pengukuran kesehatan laut berdasarkan dengan variabel pengukuran yang ditetapkan. Pada tahun 2021, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia. Untuk dapat mengukur 10 Tujuan IKLI, diperlukan variabel dan indikator data yang dapat membantu perhitungan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi laut Indonesia. Selain itu, harus terdapat tipe titik acuan untuk dapat membandingkan kondisi data yang sudah ada hingga

Tabel 6. Perhitungan IKLI Tahun 2022

No	Tipe Tujuan / Variabel	IKLI 2020		IKLI 2021		IKLI 2022
		Pleminary Data 2019	Update Data 2019	Pleminary Data 2020	Update Data 2020	Date 2021
1	Sumber Pangan	7,85	7,81	9,03	9,03	8,88
2	Perikanan Artisanal	7,27	7,73	7,42	7,2	7,63
3	Sumber Produk Alam	8,64	8,16	6,36	6,36	5,92
4	Penyimpanan Karbon	7,86	7,45	8,91	8,78	10,00
5	Perlindungan Pesisir	5,05	4,76	6,01	5,71	6,10
6	Sumber Mata Pencaharian	7,29	7,37	8,13	7,11	7,36
7	Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi	8,07	8,33	5,72	5,45	5,55
8	Perlindungan Spesies dan Tempat Ikonis	8,32	4,59	6,06	6,06	6,78
9	Perairan yang Bersih	5,82	7,23	9,12	7,39	7,43
10	Keanekaragaman Hayati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total Nilai Agregat		76,79	73,44	76,76	73,06	76,65

Pada tahun 2020, Kemenko Marves menerbitkan Pedoman Pengukuran IKLI yang kemudian digunakan pertama kali untuk mengukur Skor IKLI pada tahun 2020 dengan menggunakan data tahun 2019. Pedoman Pengukuran IKLI telah mulai disosialisasikan untuk dipahami secara luas di kalangan akademisi dan diharapkan dapat dikembangkan untuk mengukur kinerja pembangunan kelautan di tingkat provinsi. Perhitungan skor IKLI kemudian dilanjutkan setiap tahunnya dan tahun 2022 merupakan tahun ke-3 skor IKLI dihitung secara nasional setelah tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan hasil diskusi dan perhitungan yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Diperoleh nilai IKLI Agregat tahun 2022 sementara sebesar 75,65, skor ini dapat digunakan sementara hingga evaluasi yang dilakukan pada akhir Tahun 2023. Estimasi skor IKLI Tahun 2022 menggunakan data (sementara) Tahun 2021, demikian juga estimasi IKLI Tahun 2021 diperbaiki dengan data perbaikan (updated) Tahun 2020, kemudian estimasi IKLI Tahun 2020, menggunakan data Tahun 2019 dan tidak mengalami perubahan. Dengan perubahan dan perbaikan data, IKLI Tahun 2021 berubah dari 76,76 (data sementara) menjadi 73,06 (data perbaikan). Dengan data yang diperbaharui maka perkembangan IKLI adalah sebagai berikut, 73,44 (Tahun 2020), menjadi 73,06 (Tahun 2021) dan 75,65 (Tahun 2022).

Berdasarkan pada Target PK, persentase capaian Nilai IKLI adalah 99,54% (Target PK 76) dan untuk persentase capaian pada SIK-M adalah 101,17%.

Beberapa rekomendasi dalam Optimalisasi Pengelolaan Jasa Kelautan adalah:

1. Diperlukan adanya upaya untuk estimasi skor IKLI berbasis model dinamis, model IKLI yang dinamis perlu dikembangkan dan dianalisis sebagai suatu proses sains;
 2. Sebagai suatu indeks kumulatif, peran setiap lembaga untuk menyediakan data yang akurat memang sangat dibutuhkan. Di tingkat nasional, banyak lembaga yang berperan dalam dalam menyediakan data dalam proses estimasi IKLI. Bila saatnya IKLI diestimasi di tingkat daerah maka disarankan agar Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi bertanggung jawab dalam hal ini;
 3. Akan segera dilakukan finalisasi data untuk mendapatkan Nilai IKLI Agregat Tahun 2022 yang akan dipublikasikan pada awal tahun 2023.
2. Sasaran Strategis Dua (SS.2) adalah **“Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim***.

SS.2 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* (“Terwujudnya Ekonomi Maritime Yang Inklusif Dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional”) dan serta SS.7 Indikator.9 di *Customer Perspective* (“Meningkatnya Produksi Barang Dan Jasa Serta Nilai Tambah Sumberdaya Alam) pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan berdasarkan peta strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana

produksi sumber daya maritim dalam aspek perikanan budidaya dan perikanan tangkap tersedia dan proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai ekspor pada sektor perikanan. Capaian nilai produksi dan nilai ekspor tersebut disesuaikan pada Target RKP 2022. Secara berkelanjutan adalah kondisi yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Pada Tahun 2021, capaian produk perikanan tangkap dan budidaya adalah 8.088 juta ton untuk perikanan tangkap dan 16,39 Juta Ton untuk perikanan budidaya. Sedangkan capaian nilai ekspor pada Tahun 2021 adalah 5,45 US\$.

Secara akumulasi target pada IKU ini adalah 80%. Secara matematis sesuai dengan Dokumen RKP 2022, detail dari target IKU ini adalah sebagai berikut:

- Target Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2022 adalah 8,69 Juta ton
- Target Produksi Rumput Laut pada Tahun 2022 adalah 11,8 Juta ton
- Target Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 adalah 8,88 Juta Ton
- Target Nilai Ekspor Perikanan pada Tahun 2022 adalah 7,13 US\$ Miliar

Capaian akumulasi produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan nilai ekspor perikanan yang dijadikan sebagai capaian produksi perikanan yang berkelanjutan, pada Tahun 2022 mencapai nilai persentase capaian 86,13%. Jika dibandingkan dengan Target PK 2022 yaitu 80% maka capaian persentasenya adalah 107,66% dan persentase capaian pada aplikasi SIK-M adalah 113.96%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021, capaian pada Tahun 2022 menurun 4,25%. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan target pada Dokumen PK 2022.

3.1.2 Customer Perspective

3. Sasaran Strategis Tiga (SS.3) adalah **“Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu”** dengan indikator kinerja ***Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu***

SS.3 ini akan mendukung SS.1 Indikator.1 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim dengan indikator kinerja, Indeks Kesehatan Laut Indonesia.

Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir adalah pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan melalui penilaian menyeluruh yang dilihat dari aspek-aspek yang berkaitan dengan meliputi penataan dan serta pemanfaatannya. Terpadu adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kewenangan pusat dan daerah, berbasis ilmiah dan kesepakatan, kegiatan strategis dan kepentingan stakeholder, akses masyarakat dan kedaulatan wilayah serta dimensi ruang vertikal maupun horizontal.

Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu adalah kondisi terlaksananya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan secara terintegrasi dalam waktu yang lebih singkat melalui penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan dan pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Secara akumulasi target pada IKU ini adalah 80%. Target IKU tersebut berasal dari rata-rata nilai capaian Jumlah RZ, capaian Nilai IKLI dan Capaian Luas Kawasan Konservasi. Detil target pada IKU ini secara matematis adalah sebagai berikut (detil target berasal dari Dokumen RKP 2022) :

- Target Jumlah RZ pada Tahun 2022 adalah 22 RZ
- Target Nilai IKLI pada Tahun 2022 adalah 76
- Target Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola secara berkelanjutan pada Tahun 2022 adalah 25,1 Juta Ha

Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu merupakan rata-rata dari capaian jumlah rencana dan zonasi tahun 2022, capaian IKLI tahun 2022, dan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan tahun 2022, dibandingkan dengan masing-masing target tahun 2022 yang telah ditetapkan, kemudian dikalikan dengan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan dengan data yang dihasilkan, diperoleh nilai 103,85%. Secara matematis, persentase capaian jika dibandingkan pada target dalam dokumen PK (80%) capaiannya sebesar 129,81%. Lalu kemudian capaian pada dokumen Sik-M adalah sebesar 101,69%. Secara sasaran strategis dan indikator kinerja utama, jika dibandingkan dengan capaian pada TA 2021, capaian pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,47%. Tetapi nilai tersebut memiliki perbedaan variabel dalam perhitungannya.

Telah dijelaskan bahwa Capaian Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang terpadu adalah hasil dari capaian jumlah rencana dan zonasi, capaian IKLI dan capaian luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan pada Tahun 2022.

Capaian jumlah rencana dan zonasi pada Tahun 2022 adalah 26 RZ, jika dibandingkan dengan target yang adalah 20 RZ maka persentase capaiannya adalah 130%. Lalu kemudian capaian nilai IKLI pada Tahun 2022 adalah 75,65, dan jika dibandingkan dengan target yang adalah 76, persentase capaiannya adalah 99,54%. Dan pada capaian luas kawasan konservasi perairan, dicapai nilai luasan sebesar 11.316.082 ha, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan (13.800.000 Ha) persentase capaiannya adalah 82%.

Dalam rangka mendorong pengelolaan ruang laut dan peisisir yang terpadu, upaya yang dilakukan oleh Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir adalah memfokuskan pada sinkronisasi, koordinasi dan pengawalan terhadap 3 isu utama yaitu pengintegrasian tata ruang laut dan darat melalui penetapan Rencana Zonasi (RZ), peningkatan kesehatan laut melalui implementasi Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI), serta penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di K/L teknis yang terlibat pada isu-isu tersebut. Pada isu integrasi tata ruang, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir berkoordinasi dan mengawal isu tersebut selama berproses di KKP, ATR/BPN, Kemendagri, Kemenkumham hingga ke Setneg dan Setkab. Isu Kesehatan Laut dengan KKP, KLHK, ESDM, Kemhub, Kominfo dll, sementara isu Kawasan Konservasi berkoordinasi dengan KKP, KLHK, Pemda, pihak swasta dan internasional.

Fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian terkait 3 isu utama tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, workshop/seminar/lokakarya, kunjungan lapangan, FGD, serta pemberian masukan/rekomendasi terhadap 3 isu utama di atas. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait upaya mendorong tercapainya pengelolaan ruang laut dan pesisir yang terpadu, maupun dalam rangka mencari solusi bagi permasalahan/isu yang muncul, kegiatan tersebut sebagai berikut:

a) Integrasi Tata Ruang (Rencana Zonasi)

- Rapat Koordinasi dan FGD terkait integrasi RTRWN, RTRKSN, dan RTRWP
- Rapat Koodinasi dan FGD Penyusunan Materi Teknis Perairan
- Rapat Evaluasi Progres Percepatan Penataan Ruang Laut (setiap triwulan)

- Pelaksanaan Marine Spatial Planning & Services Expo 2022
 - Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi KKPRL
- b) IKLI dan Pengelolaan Jasa Kelautan
- Rapat Koordinasi IKLI untuk memperoleh IKLI Agregat Tahun 2022
 - Koordinasi terkait Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel bawah laut
 - Koordinasi terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
 - Pelaksanaan Hari Nusantara Tahun 2022
 - Serah Terima Koleksi Negara BMKT dari KKP ke Kemendikbudristek
 - Rperpres Pengelolaan BMKT telah diparaf Menko
- c) Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Implementasi ICRG
- Rakor perihal Kawasan Konservasi dan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - Rapat Koordinasi terkait rencana hibah Eks KRI dari TNI AL kepada K/L terkait, Pemda, dan Swasta sebagai Destinasi Wisata
 - Koordinasi kerja sama terkait restorasi terumbu karang
 - Beberapa workshop terkait pengelolaan kelautan yang berkelanjutan
 - Road to Ocean 20
 - Ocean 20
 - National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)
4. Sasaran Strategis Empat (SS.4) adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan***

SS.4 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

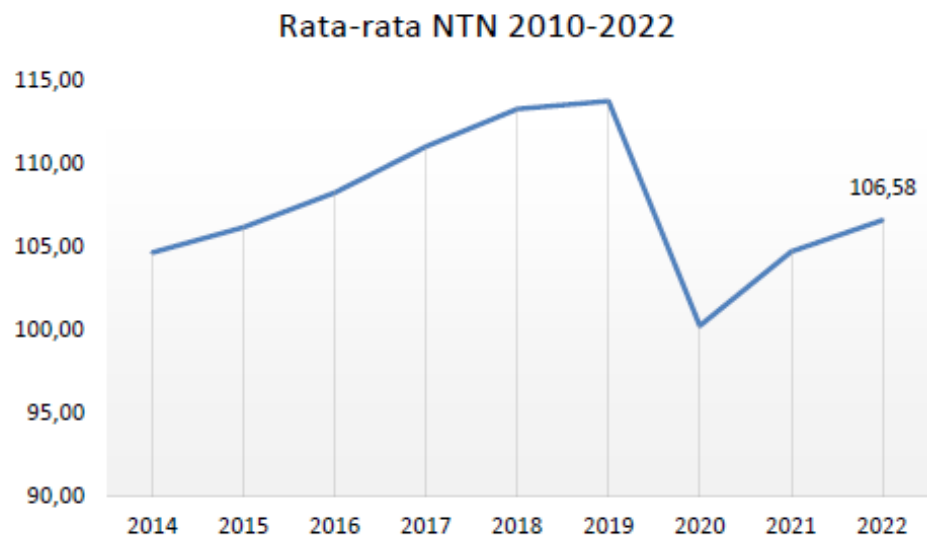
Target dari SS ini adalah adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dari capaian pada 2021 yaitu 8,08 juta ton menjadi sesuai dengan target RKP 2022 yaitu 8,88 juta ton, dan serta adanya peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat dari 106,79 pada tahun 2022 menjadi 104-106 sesuai dengan target RKP 2022.

Target persentase capaian produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan sebesar 80% dan didapatkan capaian sebesar 97,42%. Persentase capaian yang dicapai jika dibandingkan dengan target PK (80%) adalah sebesar 121,78%. Persentase capaian pada SIK-M adalah 122,78%.

Capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 naik dari 7,22 juta ton di tahun 2021 menjadi 7,85 juta ton di tahun 2022. Capaian NTN juga naik dari sebelumnya rata-rata 104,69 pada tahun 2021 menjadi 106,46 pada tahun 2022. Produksi perikanan tangkap dan NTN menunjukkan tren peningkatan yang positif seiring dengan perbaikan perekonomian setelah pandemi Covid-19. Regulasi yang stabil dan iklim bisnis yang positif turut mendukung kenaikan produksi dan NTN pada 2023 ini.

Tabel 7. Nilai Tukar Nelayan TA 2022

Tahun	Triwulan	Bulan	Nilai
2022	1	1	107,22
2022	1	2	107,36
2022	1	3	106,65
2022	2	4	106,77
2022	2	5	107,46
2022	2	6	106,96
2022	3	7	107,1
2022	3	8	107,21
2022	3	9	105,24
2022	4	10	105,42
2022	4	11	104,96
2022	4	12	105,23



Sumber: Satu Data KKP (2023)

Gambar 3. Grafik Rata-Rata NTN 2010-2022

Tabel 8. Tabel Produksi Perikanan Tangkap

Tahun	Triwulan	Produksi Perikanan Tangkap Laut	Produksi Perikanan Tangkap PUD	Total Produksi Perikanan Tangkap	Satuan	Status
2022	1	1.767.387	134.178	1.901.565	Ton	**
2022	2	1.868.919	152.435	2.021.354	Ton	**
2022	3	1.898.742	148.066	2.046.808	Ton	***
2022	4	1.771.535	113.576	1.885.111	Ton	Prognosa dari data 2021
Total Produksi		7.306.583	548.255	7.854.838	Ton	

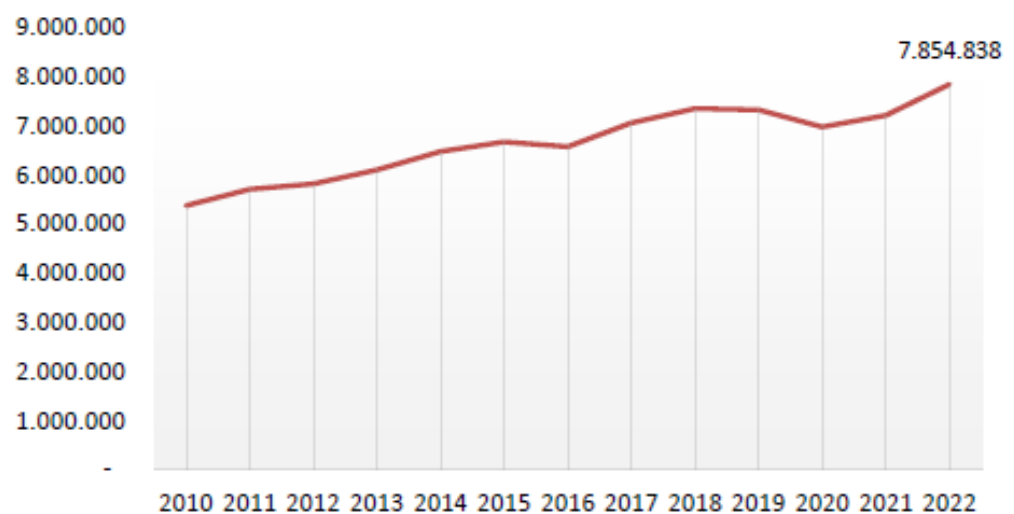
Ket:

*** Angka sangat-sangat sementara

** Angka sangat sementara

* Angka sementara

Produksi Perikanan Tangkap 2010-2022 (Ton)



Sumber: Satu Data KKP (2023)

Gambar 4. Grafik Produksi Perikanan Tangkap 2010-2022 (Ton)

5. Sasaran Strategis Lima (SS.5) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal***

SS.5 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi

Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berkualitas, didukung oleh pengembangan kawasan yang berkelanjutan dengan dukungan sarana produksi (induk, benih, pakan dan obat) yang berkualitas dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai pada kondisi yang optimal, yang ada kondisi dimana suatu capaian produksi perikanan budidaya berkualitas, berdaya dukung dan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang optimal adalah kondisi dimana produksi perikanan budidaya Tahun 2021 sebesar 16,39 Juta Ton perlu dikembangkan menjadi 20,49 Juta Ton terdiri dari produksi Ikan sebesar 8,69 Juta Ton dan produksi rumput laut sebesar 11,8 Juta Ton (Perpres 85 Tahun 2021 tentang RKP 2022).

Persentase capaian produksi perikanan budidaya yang optimal berdasarkan hasil capaian produksi perikanan budidaya tahun 2022 dibagi dengan target produksi perikanan budidaya tahun 2022. Angka capaian produksi tertera merupakan prognosa capaian produksi perikanan budidaya untuk tahun 2022. Hal ini disebabkan, rilis data produksi final umumnya baru akan dikeluarkan secara resmi oleh instansi bersangkutan \pm 1-2 tahun setelah tahun anggaran dimaksud. Selama kurun waktu tersebut data produksi eksisting akan terus berubah secara dinamis mengikuti laporan dan inputan dari lapangan. Capaian produksi perikanan budidaya pada Tahun 2022 adalah 16,39 Juta Ton dengan persentase capaian dengan target 20,54 Juta Ton adalah 80,9%. Persentase capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada Dokumen PK (80%) adalah 101,13% dan persentase capaian pada aplikasi SIK-M adalah 110,13%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021, capaian Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,90%.

Target persentase capaian produksi perikanan budidaya yang optimal sebesar 80% dan didapatkan capaian sebesar 80,9 %. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 didukung dengan meningkatnya produksi rumput laut di Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku dan Jawa Timur. Selain karena kondisi iklim yang baik dan perbaruan bibit rumput laut hasil kultur jaringan yang sudah mulai menyebar luas, juga didorong oleh

peningkatan harga rumput laut pada akhir semester I 2022 yang meningkatkan animo para pembudidaya rumput laut.

6. Sasaran Strategis Enam (SS.6) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan***

SS.6 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah upaya untuk meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan prasarana logistik, peningkatan mutu serta pemasaran produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing. Kondisi yang berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana tercapainya target ekspor hasil perikanan sesuai target pada RKP 2022 dengan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas produk.

Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan adalah suatu upaya untuk mencapai nilai ekspor hasil perikanan dengan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas produk sesuai target pada RKP 2022. Berdasarkan Dokumen RKP Tahun 2022, target nilai ekspor perikanan pada Tahun 2022 adalah sebesar 7,13 US\$ Miliar.

Pada Tahun 2022, capaian nilai ekspor adalah USD 5,71 Miliar dengan persentase capaian jika dibandingkan dengan nilai target USD 7,13 Miliar adalah 80,08%. Persentase capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada Dokumen PK (80%) adalah 100,1% dan persentase capaian pada SIK-M adalah 108,98%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021, capaian Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,02%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan target pada Dokumen PK.

Dalam mencapai target ekspor, yang telah dilakukan Kemenko Marves adalah sebagai berikut:

- Rapat koordinasi kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan secara periodik, untuk memantau pencapaian dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan

target pada tahun bersangkutan. Hal tersebut perlu dilakukan agar kendala ekspor yang mungkin terjadi bisa ditemukan solusinya dan segera selesai;

- Rapat koordinasi terkait penanganan kasus penolakan produk ekspor kelautan dan perikanan Indonesia di Tiongkok, karena ada temuan jejak covid pada kemasan luar. Beberapa pertemuan lintas kementerian, serta bilateral dengan Pemerintah Tiongkok telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- Koordinasi persiapan produk ikan menjadi menu dalam catering haji 2022;
- Percepatan perundingan dagang khususnya dengan Uni Eropa dan negara tujuan baru, sehingga produk kelautan dan perikanan Indonesia dapat diterima oleh lebih banyak negara dengan bea masuk yang bersaing;
- Penguatan mutu produk kelautan dan perikanan Indonesia agar sesuai dengan permintaan negara pembeli;
- Dukungan kebijakan logistik untuk mempermudah lalu lintas produk kelautan dan perikanan Indonesia baik di domestik maupun internasional; Upaya dan kegiatan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pencapaian nilai ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia pada tahun 2022.

7. Sasaran Strategis Tujuh (SS.7) adalah **“Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan***

SS.7 ini akan mendukung SS.8 Indikator.11 di *Customer Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara dengan Indikator Indeks Kapabilitas Inovasi.

Hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya adalah kondisi dimana adanya pengembangan industri penghasil bahan baku (industri hulu) menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi (industri hilir) di sektor industri kelautan, perikanan, dan penunjangnya.

Kondisi yang Berkelanjutan adalah suatu capaian akumulatif dari capaian ketersediaan inovasi teknologi industri perikanan untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah hasil riset yang

dimanfaatkan industri kelautan dan perikanan Tahun 2022 dengan berorientasi antara lain pada kelestarian lingkungan hidup, partisipasi publik, dan pertumbuhan ekonomi.

Hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan adalah kondisi dimana tercapainya persentase capaian akumulatif dalam capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, partisipasi public dan pertumbuhan ekonomi.

Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan persentase akumulasi capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibandingkan dengan target Tahun 2022 pada Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020-2024.

Capaian Hilirisasi Industri Kelautan pada Tahun 2022, dihitung berdasarkan dari capaian ketersediaan inovasi teknologi pergaraman untuk mendukung produksi pergaraman nasional 2022, capaian pelaku atau kelompok yang terfasilitasi di Tahun 2022 dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP. Capaian tersebut setelah diakumulasikan mencapai nilai 100% untuk capaian 2022. Jika dibandingkan dengan target PK yang adalah 80%, maka persentase yang dicapai adalah 125%. Kemudian capaian pada Aplikasi SIK-M nya adalah 112,50%.

Persentase capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional dihitung berdasarkan capaian ketersediaan inovasi teknologi pergaraman untuk mendukung produksi pergaraman nasional tahun 2022 dibagi dengan target keterseiaan inovasi teknologi industri pergaraman tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional Garam merupakan, “senyawa kimia yang komponen utamanya natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.” Ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman berarti kondisi dimana dukungan terhadap

produksi baik di sisi hulu hingga hilir dilakukan secara terukur melalui keberadaan aspek regulasi yang mendukung penyediaan teknologi dan adanya inovasi berbasis teknologi yang diadopsi pada proses berjalannya produksi.

Persentase pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dihitung dari jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi melalui rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- Tingginya pembelian barang impor untuk pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN, sehingga Presiden menyampaikan bahwa pengadaan barang impor harus dikurangi, dan perlu upaya peningkatkan belanja produk dalam negeri;
- Permasalahan distribusi logistik perikanan saat ini adalah jumlah unit reefer container masih minim bahkan tidak tersedia dan mahal di area pelabuhan perikanan terutama pada daerah terpencil/pulau-pulau kecil di Wilayah Indonesia serta keterbatasan dan mahalnya harga sewa untuk reefer container kapasitas ekspor;
- Produk perikanan lokal masih banyak yang tidak memenuhi syarat ekspor dan salah satu penyebabnya adalah mutu atau kualitas produk yang menurun dikarenakan kekurangan fasilitas cold storage maupun reefer container dalam proses pengangkutan;
- Telah terbangun prototipe reefer container kapasitas 1 dan 5 ton yang diproduksi oleh PT INKA (Persero) dan telah diuji cobakan pada armada kapal PT PELNI (Persero) sebanyak 2 kali dengan jumlah masing-masing 1 unit untuk kapasitas 1 dan 5 ton;
- Uji coba pemanfaatan reefer container tahap I dilaksanakan di KM Bukit Raya pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022 dilanjutkan dengan uji coba pemanfaatan tahap II pada tanggal 5 Juni 2022 sampai 18 Juni 2022 di KM Awu menunjukkan hasil yang memuaskan dimana suhu target yang diinginkan dan sistem IoT yang dipasangkan pada reefer container selama pengujian bekerja dengan baik;
- Telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PELNI (Persero), PT INKA (Persero), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Sinergi Sarana Logistik BUMN dan Perguruan Tinggi pada 21 Juli 2022, hal ini sebagai landasan kerja sama pemanfaatan reefer container buatan dalam negeri untuk sarana logistik dalam negeri (kapal angkutan barang dan perintis) maupun untuk kapasitas ekspor;
- Reefer container milik PT INKA (Persero) dalam waktu dekat akan melakukan kerja sama dengan PT PELNI (Persero) dalam memenuhi kebutuhan reefer container PT

PELNI (Persero) dengan jumlah 62 unit untuk kapasitas 20 feet yang saat ini sedang dalam proses administrasi pengadaan;

- PT INKA (Persero) telah membangun prototipe reefer container kapasitas 20 dan 40 feet dan akan dilakukan uji coba pemanfaatannya seiring dengan adanya permintaan untuk memenuhi kebutuhan reefer container industri rantai dingin Indonesia;
- Telah dilakukan sertifikasi TKDN untuk reefer container kapasitas 1 dan 5 ton dan sedang dalam proses persiapan pengajuan sertifikasi TKDN untuk kapasitas 20 dan 40 feet;

Terdapat dari dua rekomendasi kebijakan yang perlu diimplementasikan guna mendukung tersedianya inovasi teknologi industri perikanan yaitu melalui penguatan adopsi teknologi produksi di sektor hulu dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pengolahan hasil produksi 2. Upaya pengembangan diversifikasi produk pangan serta pempenyelesaian kemudahan izin edar bagi UMKM produk pangan berbahan dasar ikan memerlukan langkah-langkah strategis yang tepat melalui koordinasi yang intensif dengan pihak terkait, dibekali pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait isu-isu yang mengemuka dalam berbagai pembahasan serta memiliki jaringan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, instansi dan K/L, kalangan akademisi, NGO serta dunia usaha agar Kemenko Marves khususnya di Kedeputan Sumber Daya Maritim dapat menjadi barometer yang diandalkan seluruh pemangku kepentingan.

Untuk riset terapan, akan terus didorong Business Matching antara hasil riset institusi/lembaga pendidikan dan penelitian dengan industri, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan di masa depan serta siap untuk bersaing di pasar global.

3.1.3 Internal Business Perspective

8. Sasaran Strategis Delapan (SS.8) adalah **“Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan kebijakan bidang perikanan budidaya dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2022 sebesar 100%. Definisi

ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah capaian pada penyusunan rancangan kebijakan Tahun 2022 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang

Penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang didasari atas deskripsi isu sebagai berikut:

- Kondisi saat ini tambak udang didominasi oleh tambak tradisional dengan luasan 247.803 ha. Produksi tambak tradisional dengan luasan 1 ha menghasilkan 0.6 ton per hektare per tahun. Sehingga untuk mencapai target pemerintah sebesar 2.000.000 ton pada tahun 2024 menjadi sangat sulit untuk dicapai.
- Terdapat 21 jenis dokumen perizinan untuk kegiatan usaha tambak udang, sehingga menyulitkan dalam melakukan kegiatan usaha.
- Pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi antara industri hulu dan hilir sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi dan berdampak pada daya saing yang tinggi.

Atas dasar isu tersebut, pilihan kebijakan dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Teknologi Tambak Udang dengan Cara Revitalisasi dan Modelling.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas tambak udang tradisional yang hanya mampu memproduksi 0.6 ton per hektare per tahun, dilakukan revitalisasi dari tambak tradisional di revitalisasi menjadi tambak semi intensifi agar dapat menghasilkan produksi sekitar 20 - 30 ton per ha per tahun dengan luasan tambak 45.000 ha. Tahun 2022, telah ditetapkan lokasi tambak udang tradisional menjadi tambak semi intensif yang tersebar di Sumatera Utara seluas 10.000 ha, Aceh Timur, Aceh barat, banyuasin dan lampung selatan. Kemudian, Nusa Tenggara seluas 2.000 ha yang berlokasi di Bima dan Dompu. Selanjutnya, Sulawesi seluas 22.500 ha yang berlokasi di Gorontalo Utara, Donggala, Wajo, Pinrang, Takalar, Kolaka, Kolaka Utara dan Polewali Mandar. Serta Kalimantan seluas 10.500 ha yang berlokasi di Sukamara, tanah Tumbu, tanah laut, Kutai kartanegara, dan tana Tidung. Sementara itu, saat ini telah diselesaikan DED untuk revitalisasi tambak

tradisional yaitu Aceh Timur (1000 ha), Lampung Selatan (1000 ha), Pinrang (1000 ha) dan Sukamara (1000 ha). Pemerintah juga menggunakan strategi modeling tambak udang modern dengan target produksi 80 ton per hektare per tahun. Calon lokasi untuk modelling tambak udang tersebar di 5 provinsi yakni Sumatera seluas 4.000 hadan kalimantan seluas 2.000 ha. Di Nusa tenggra barat tersedia 1.000 ha, kepulauan maluku seluas 1.000 ha serta sulawesi seluas 6.000 ha.

Saat ini yang sedang dilakukan pembangunan tambak udang modern berbasis kawasan juga sedang dibangun pengerjaannya di kabupaten kebumen, Provinsi Jawa tengah. Konsep modelling tambak udang modern dibuat dengan luas bahan hingga 100 ha, yang sedang dibangun percontohnya di kabupaten Kebumen. Sistem ini memiliki sistim integrasi hulu hilir agar dapat menekan biaya produksi dan penerapan teknologi modern.

2) Simplifikasi Perizinan Usaha Tambak Udang

Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi para investor sebagai amanah dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020



Gambar 5. Panduan Perizinan Usaha Tambak Udang

tentang Cipta Kerja, Kemenko Bidang kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah melakukan penyusunan dan penyederhanaan buku panduan perizinan usaha tambak udang dari 21 (dua puluh satu) jenis perizinan menjadi 1 jenis perizinan melalui OSS.

3) Crash Program Crash Program Revitalisasi tambak dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang Tahun 2022 – 2024.

Produksi udang di Indonesia ditargetkan pada tahun 2024 bisa mencapai 2 (dua) juta ton. Diharapkan produksi sebesar itu sebagian besar akan diekspor agar dapat

menempatkan Indonesia masuk dalam 5 besar sebagai pengeksport hasil perikanan. Dalam rangka mewujudkan hak tersebut, maka pemerintah mendorong program yang dapat menggenjot produktivitas dan kontinuitas budidaya udang. Untuk pencapaian target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi bersama dengan Kementerian Lembaga yang bergabung dalam Kelompok Kerja Peningkatan Produksi Udang Nasional, bersama-sama menyusun Crash program peningkatan Produksi Industri Udang TA. 2022-2024. Crash program ini menjadi acuan bagi semua Kementerian Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dan Asosiasi Perikanan serta lembaga swasta lainnya, untuk melakukan kolaborasi untuk pengembangan dan percepatan produksi udang nasional. Kementerian Koordinator Bidang kematriman dan Investasi telah menetapkan Crash Program ini dalam Kepemenko No. 42 Tahun 2022 tentang Crash Program Revitalisasi tambak dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang Tahun 2022 – 2024.

Faktor pendukung dalam penyusunan rancangan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi para investor sebagai amanah dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kemenko Bidang kematriman dan Investasi bersama Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah melakukan penyusunan dan penyederhanaan buku panduan perizinan usaha tambak udang dari 21 (dua puluh satu) jenis perizinan menjadi 1 jenis perizinan melalui OSS
2. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi bersama dengan Kementerian Lembaga yang bergabung dalam Kelompok Kerja Peningkatan Produksi Udang Nasional, bersama-sama menyusun Crash program peningkatan Produksi Industri Udang TA. 2022-2024. Crash program ini menjadi acuan bagi semua Kementerian Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dan Asosiasi Perikanan serta lembaga swasta lainnya, untuk melakukan kolaborasi untuk pengembangan dan percepatan produksi udang nasional. Kementerian Koordinator Bidang kematriman dan Investasi telah menetapkan Crash Program ini dalam Kepemenko No. 42 Tahun 2022 tentang

Crash Program Revitalisasi tambak dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang Tahun 2022 – 2024.

Kendala dalam penyusunan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Tarik ulur kepentingan antar K/L yang terkadang masih menjadi kendala dalam proses implementasi terhadap kebijakan yang telah disusun.
2. Dinamika penganggaran juga turut menjadi kendala selama proses implementasi. Target - target yang telah ditetapkan tidak bisa direalisasikan lebih optimal.
3. Setiap K/L memiliki kebijakan dan regulasi tersendiri. Sehingga proses integrasi perizinan relatif membutuhkan waktu yang lebih lama.
4. Proses sosialisasi ke Pemda belum masif dan rutin, sehingga tidak seluruh Pemda terinform terkait kebijakan yang ada.

Dari uraian di atas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan revitalisasi dan sistem modeling untuk pencapaian target produksi 2.000.000 ton di tahun 2024
2. Kementerian Lembaga untuk mentaati petunjuk pelaksanaan yang telah disusun dalam Panduan Perizinan Usaha tambak Udang.
3. Pelaksanaan Crash Program revitalisasi tambak dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang harus dilaksanakan sesuai dengan arahan yang ada, karena revitalisasi tambak udang masuk dalam program prioritas pada Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, apabila akan dilakukan penghematan anggaran maka pihak Kementerian Lembaga tersebut perlu menyampaikan justifikasinya kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kantor Staf Kepresidenan.

b) Rancangan Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan

Penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan didasari atas deskripsi isu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program klaster komoditi unggulan belum terkoordinasi dengan baik di level provinsi dan kabupaten kota. Diharapkan program ini juga didukung melalui perencanaan terintegrasi di pemda dan masuk dalam RKPD daerah sehingga lokus mendapat dukungan kegiatan yang memadai.

2. Setiap lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kampung budidaya, secara eksisting sudah ada kegiatan budidaya sebelumnya, lokasi ini memerlukan masterplan yang memadai sehingga ada kesinambungan program yang bisa dijadikan rujukan pada kegiatan berikutnya, tidak berhenti pada hanya memberikan bantuan dan selanjutnya tidak ada kegiatan lagi atau kembali seperti biasa.
3. Sebagian besar kawasan budidaya yang sudah ditetapkan belum didukung oleh sistem logistik induk dan benih yang terintegrasi. Sumber induk dan benih masih didatangkan dari luar daerah yang memerlukan transportasi yang memakan waktu cukup lama.
4. Kawasan pengembangan perikanan belum didukung oleh ketersediaan pakan yang memadai. Program pakan mandiri belum mampu menopang keberlangsungan budidaya sehingga pilihan warga adalah membeli pakan pabrikan yang harganya lebih mahal.
5. Para pembudidaya yang merupakan pembudidaya skala kecil sebagian besar belum menerapkan CBIP atau Best Aquaculture Practices

Pemetaan isu tersebut dilakukan berdasarkan analisa lokasi yang dilakukan pada kota-kota berikut:

No	Provinsi	Kabupaten	Komoditi Unggulan
1	Sumatera Barat	Pasaman	Ikan Emas
2	Sumatera Selatan	Oku Timur	Ikan Patin
3	Jawa Tengah	Pati	Ikan Nila Salin
4	Jawa Timur	Gresik	Ikan Bandeng
5	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Ikan Kerapu
6	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Lobster
7*	Maluku	Maluku Tenggara	Rumput Laut

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan klaster perikanan budidaya unggulan, Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Pokja Pengembangan Kluster Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Tahun 2022
2. Koordinasi DJPB, Pemda provinsi dan kabupaten pada 6 lokasi klaster budidaya
3. Kunjungan Lapangan dan rapat koordinasi di daerah 6 lokasi klaster budidaya
4. Koordinasi Rencana Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam Mendukung Pengembangan Seaweed Estate di Maluku Tenggara;
5. Finalisasi dokumen kerjasama Biotrop IPB dan dunia usaha yang akan dilaunching bulan oktober 2022.

6. Koordinasi dukungan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada pembudidaya ikan yang difasilitasi oleh bank pemerintah (BRI, Mandiri, BNI)
7. Koordinasi pengembangan Kampung rumput laut di Sanrobone Kabupaten Takalar.
8. Fasilitasi pengembangan budidaya dalam mendukung blue food dan ocean agenda.

Atas dasar isu-isu tersebut, pilihan kebijakan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan klaster budidaya unggulan melalui sistem corporate farming pembudidaya.

RPJMN 2020-2024 menargetkan adanya penguatan korporasi petani dan nelayan sebanyak 350 baik dalam bentuk koperasi maupun kelembagaan usaha lainnya.

Corporate farming adalah bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan dalam satu kawasan.

Keunggulan sistem corporate farming:

- Terjadi proses produksi budidaya yang berkelanjutan
- Mutu dan produksi budidaya lebih terkontrol
- Terjadi tertib tata kelola kawasan
- Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi daerah dengan dukungan dan arahan dari perusahaan inti.

Pengembangan Klaster budidaya unggulan sangat mendukung untuk menjadi corporate farming dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Klaster budidaya merupakan kelompok pembudidaya yang memiliki kawasan yang sama. Namun diperlukan mempercayai pengelolaan lahannya kepada suatu lembaga agribisnis dengan suatu perjanjian kerjasama ekonomi tertentu, dimana petani bertindak sebagai pemegang saham sesuai dengan luas lahan kepemilikannya.
- 2) Dibentuk melalui musyawarah/mufakat antar para anggotanya dengan memperhatikan sosial dan budaya setempat.
- 3) Dipimpin oleh manajer profesional, yang dipilih oleh petani serta dikelola secara transparan dan demokratis sesuai dengan kaidah bisnis komersial.

- 4) Corporate farming mensyaratkan skala usaha optimal sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumberdaya setempat, potensi dan kapasitas pengembangan agroindustri dan pemasaran, serta ketersediaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan teknis pengelolaan dalam satu manajemen.
- 5) Cakupan kegiatan corporate farming tetap bertumpu pada komoditas unggulan di wilayahnya dan memperhatikan peluang pengembangan serta diversifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.

Keberhasilan corporate farming akan lebih cepat dicapai apabila didukung oleh berbagai faktor antara lain:

1. Pengembangan corporate farming dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat.
2. Tersedianya lapangan pekerjaan alternatif lain bagi petani yang mempercayakan pengelolaan lahannya kepada corporate farming.
3. Tersedianya dana khusus untuk memulai usaha (start-up business) dan seed capital bagi petani untuk memulai kegiatan baru.
4. Terdapat lembaga (pemerintah/non pemerintah) yang mampu berfungsi sebagai fasilitator.

Pengembangan komoditi ikan kerapu di Kabupaten Kupang dapat bekerjasama dengan offtaker yang sudah ditunjuk oleh KKP dimana kelompok dapat bekerjasama dengan pengusaha dalam hal penyediaan bibit dan pakan. Sedangkan untuk komoditi ikan mas, nila salin, bandeng walaupun sudah berkembang dengan baik dan sudah ada offtaker yang membeli hasil dan dijual ke luar daerah, perlu penguatan di kelembagaan kelompok misalnya dengan membuat koperasi pembudidaya yang menjual segala keperluan produksi budidaya sampai ke diversifikasi usaha.

Sedangkan untuk komoditi rumput laut di Maluku Tenggara, corporate farming dimulai dengan kerjasama antara pemda, dunia usaha dan Biotrop Seameo IPB. Dunia usaha menyediakan bibit berkualitas melalui kultur jaringan yang disuervisi oleh IPB dan pembudidaya dapat menjual hasil rumput laut ke pengusaha dengan harga kompetitif. Pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk membangun laporan kultur jaringan.

Korporate farming juga sudah dilakukan di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, dimana masyarakat membuat koperasi Kospermino dan bekerjasama dengan pengusaha rumput laut agarindo. Pengusaha menyediakan sarana produksi dan masyarakat menjual ke agarindo hasil budidaya.

2) Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan melalui penguatan sistem logistik pakan, perbenihan dan peningkatan value added.

Hal yang urgent dalam pengembangan budidaya adalah ketersediaan pakan, benih yang berkualitas. Untuk pakan sendiri, dari segi komposisi biaya usaha, sekitar 40-70 persen komponen biaya dari pengadaan pakan. Untuk mendukung klaster perikanan budidaya unggulan yang berkelanjutan diperlukan adanya Sistem logistik pakan yang terkait dengan:

- a. Informasi data base bahan baku (ketersediaan dan jenis) di masing masing daerah/wilayah.
- b. Adanya pengembangan gudang-gudang penyangga bahan baku skala besar/medium di level daerah atau sentra produksi.
- c. Penyediaan gudang penyedia bahan baku siap pakai (pengolah bahan baku) di level kawasan. Diperlukan support untuk membangun gudang gudang penyangga bahan baku.
- d. Perlunya membangun sistem informasi logistik pakan yang bisa diakses secara online.
- e. Penguatan kelembagaan kelompok pakan mandiri di klaster produksi budidaya unggulan.

Pembangunan pabrik pakan di Pasaman dan Oku Timur diharapkan menjadi pengungkit pengembangan pakan mandiri yang berbahan baku lokal. Selain itu juga perlu adanya investasi dari pihak swasta baik koperasi maupun pengusaha lokal untuk memenuhi kebutuhan pakan yang ada.

KKP dan Kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kemendag dan Perindustrian perlu mendorong pengurangan ekspor bahan baku pakan. Hal ini perlu disertai dengan mengembangkan komoditi jagung atau kedelai dalam negeri. Program Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) untuk mendukung klaster budidaya yang dikembangkan cukup strategis, DJPB KKP perlu meningkatkan program bantuan mesin skala mini (penepung, pencetak pellet). Program Pakan Mandiri yang disupport DJPB adalah bantuan mesin skala mini (penepung,

pencetak pellet). Pakan mandiri yang dikembangkan oleh Balai Budidaya di DJPB bisa diperbesar skala dan produksinya.

Diperlukan roadmap perbenihan yang lintas sektor dengan dukungan anggaran yang multy years. Hal ini telah dilakukan untuk jenis udang melalui crash program sampai tahun 2024. Selain udang akan didorong juga pada komoditi unggulan lain seperti rumput laut, kerapu, dan lobster. Perbenihan dan pendederan skala rakyat perlu diperbanyak untuk memenuhi benih yang berkualitas. Untuk bibit rumput laut diperlukan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam pengadaan kultur jaringan seperti di Pulau Kei Maluku tenggara dan Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah daerah dan KKP perlu membenahi data dan informasi serta logistik dengan menyusun peta sebaran hatchery, hama, penyakit, jumlah kelompok, dan sebagainya.

Dalam pengembangan perbenihan perikanan budidaya, komponen yang berperan penting adalah: Broodstock center, hatchery, komoditi unggulan, asosiasi. Olehnya itu, selain melakukan revitalisasi perbenihan milik pemerintah, juga akan melibatkan balai/hatchery milik swasta. Membangun system perbenihan yang terintegrasi dengan kawasan-kawasan budidaya.

Dalam pengembangan value added, untuk kawasan budidaya rumput laut, diharapkan adanya investasi baru pada usaha pengolahan rumput laut menjadi ATC, SRC atau RC di sentra budidaya seperti di Maluku, NTT dan NTB. Selain itu untuk komoditi ikan patin di Oku Timur, Nila Salin di Kab. Pati dan ikan bandeng di Kabupaten Gresik perlu pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI) modern selain pengolahan saat ini yakni ikan asap dan ikan bandeng tanpa duri, bandeng presto yang diminati masyarakat.

Faktor yang mendukung dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telah dibentuk Pokja Pengembangan Kluster Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Tahun 2022
2. Telah dilakukan Koordinasi dengan DJPB, Pemda provinsi dan kabupaten pada 6 lokasi klaster budidaya

3. Telah dilakukan Kunjungan Lapangan dan rapat koordinasi di daerah 6 lokasi klaster budidaya
4. Telah dilakukan Koordinasi Rencana Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam Mendukung Pengembangan Seaweed Estate di Maluku Tenggara;
5. Telah dilakukan Finalisasi dokumen kerjasama Biotrop IPB dan dunia usaha yang akan dilaunching bulan oktober 2022.
6. Telah dilakukan Koordinasi dukungan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada pembudidaya ikan yang difasilitasi oleh bank pemerintah (BRI, Mandiri, BNI)
7. Telah dilakukan Koordinasi pengembangan Kampung rumput laut di Sanrobone Kabupaten Takalar.
8. Telah dilakukan Fasilitasi pengembangan budidaya dalam mendukung blue food dan ocean agenda.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program klaster komoditi unggulan belum terkoordinasi dengan baik di level provinsi dan kabupaten kota.
2. Setiap lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kampung budidaya, secara eksisting sudah ada kegiatan budidaya sebelumnya, lokasi ini memerlukan masterplan yang memadai sehingga ada kesinambungan program yang bisa dijadikan rujukan pada kegiatan berikutnya, tidak berhenti pada hanya memberikan bantuan dan selanjutnya tidak ada kegiatan lagi atau kembali seperti biasa.
3. Sebagian besar kawasan budidaya yang sudah ditetapkan belum didukung oleh sistem logistik induk dan benih yang terintegrasi. Sumber induk dan benih masih didatangkan dari luar daerah yang memerlukan transportasi yang memakan waktu cukup lama.
4. Kawasan pengembangan perikanan belum didukung oleh ketersediaan pakan yang memadai. Program pakan mandiri belum mampu menopang keberlangsungan budidaya sehingga pilihan warga adalah membeli pakan pabrikan yang harganya lebih mahal.
5. Para pembudidaya yang merupakan pembudidaya skala kecil sebagian besar belum menerapkan CBIP atau Best Aquaculture Practices

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Kementerian Kemaritiman dan Investasi bekerjasama dengan Kementerian Investasi serta KKP minggu ke 2 oktober 2022 melakukan fasilitasi investasi bagi

lokus atau kawasan budidaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan makin baik. Saat ini yang sedang dilaksanakan adalah fasilitasi kerjasama Biotrop IPB dan dunia usaha di Maluku Tenggara serta fasilitasi pengembangan investasi rumput laut NTT dengan Philipina.

2. Pengembangan seaweed estate di Maluku Tenggara dan Sumba Timur NTT yang sudah dialokasikan sebagai lokus kampung budidaya rumput laut telah dimasukkan dalam blue book sebagai salah satu lokasi yang akan mendapatkan anggaran melalui PHLN 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlu penyiapan kawasan yang memadai oleh pemerintah daerah misalnya identifikasi pemilik lahan, jumlah kelompok yang ada serta kesiapan pembudidaya dalam kerjasama investasi yang akan dikembangkan.
 3. Pemerintah daerah diminta membuat master plan kawasan dan rencana aksi pengembangan komoditi unggulan untuk klaster / kampung budidaya sesuai dengan komoditi yang telah ditetapkan. Master plan kawasan ini digunakan oleh KL yang lain untuk mendukung atau mengalokasikan kegiatan sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor.
 4. Kemenko Kemaritiman akan mendorong adanya crash program dari setiap KL/I dalam rangka mendukung klaster budidaya unggulan yang sudah ada. Crash program yang akan dibuat bisa mengadopsi pembuatan crash program lintas KL yang sudah dilaksanakan untuk komoditi udang vaname dalam mendukung produksi nasional
 5. Pengembangan corporate farming dapat mengadopsi model kerjasama yang sudah ada seperti di agarindo dengan pembudidaya di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Pengembangan rumput laut dilakukan bersama masyarakat melalui koperasi kospemindo dan pengusaha pabrikan rumput laut.
 6. Mendorong perbankan seperti BRI dan Mandiri mengalokasikan kuota KUR yang lebih memadai bagi pembudidaya sehingga bisa mendorong dalam pengembangan usaha.
 7. Mendorong Kementerian PUPR, ESDM dan PLN untuk membangun jalan, irigasi dan penyediaan listrik di lokasi-lokasi budidaya.
- c) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer**

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan isu-isu yang menjadi dasar adalah sebagai berikut:

Tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh internasional semakin meningkat

1. Kasus penolakan ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia oleh Negara Buyer masih terjadi
2. Teknologi Iradiasi berguna untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari jasad renik pathogen
3. Teknologi Iradiasi banyak diperlukan oleh untuk para pelaku usaha namun jumlahnya terbatas dan lokasi tidak strategis.
4. Membangun pengembangan teknologi Iradiasi adalah isu nasional, sehingga diperlukan Kerjasama dengan K/L terkait serta seluruh stakeholder.
5. Perlu dipertimbangkan pengembangan pembangunan teknologi Iradiasi di beberapa lokasi sentra produk kelautan dan perikanan untuk kemudahan jangkauan para pelaku usaha dalam proses bisnisnya

Berdasarkan deskripsi isu tersebut, pilihan-pilihan kebijakan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Pembangunan Fasilitas Unit Iradiasi di Indonesia

Saat ini nilai ekspor produk KP Indonesia meningkat sebesar 25,41%. Isu mengenai produk KP sejalan dengan topik pembangunan berkelanjutan nomor 3 tentang Kualitas Hidup dan Peningkatan Kesejahteraan.

Indonesia merupakan negara anggota “International Atomic Energy Agency” (IAEA) dan proaktif di dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi iradiasi pada bahan pangan dan regulasi iradiasi pangan tertuang dalam UU Pangan No. 18/2012 pasal 80 dan 81.

Data KKP 2022, menunjukkan adanya sekitar 863 UPI dengan ruang lingkup produk sebanyak 2.951 jenis produk dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah fasilitas Iradiator di Indonesia yang baru tersedia sebanyak 2 unit dan berlokasi pada daerah yang kurang strategis dinilai kurang se[adap dengan banyaknya UPI. Terlebih jika dibandingkan dengan dua negara ASEAN lainnya yang telah memiliki

fasilitas iradiator yang jumlahnya lebih banyak dibanding seperti Vietnam 8 unit dan Thailand 7 unit.

Secara fungsi Unit Iradiator dapat bersifat multi fungsi yakni tidak hanya dipergunakan untuk produk kelautan dan perikanan. Namun dapat pula diaplikasikan untuk produk pertanian, perkebunan, kehutanan, kosmetik, alat Kesehatan dan lain-lain.

2. Pembuatan Kajian atau Feasibility Study (FS) oleh BRIN terkait Rencana Pengembangan Pembangunan Unit Iradiasi di Indonesia

Beberapa pertimbangan BRIN membuat FS antara lain adalah :

- a. Sumber daya manusia (SDM) dan pengetahuan dimiliki oleh BRIN dan dapat disumbangkan bagi masyarakat luas.
- b. BRIN merupakan organisasi yang fokusnya pada riset
- c. BRIN menyatakan siap membantu di bidang riset, tenaga ahli, dan quality control laboratorium.
- d. BRIN menyampaikan Pembangunan fasilitas Iradiator membutuhkan 80 % TKDN.

3. Penetapan 3 (tiga) lokasi strategis rencana pengembangan Pembangunan Unit Iradiasi di Indonesia.

Berdasarkan beberapa hasil rakor yang telah dilakukan bersama dengan berbagai K/L terkait, diusulkan pembangunan unit Iradiator di 3 lokasi yakni Surabaya, Pelabuhan Perikanan Bitung-Manado dan Pelabuhan Perikanan Belawan-Medan. Beberapa pertimbangan adalah mengingat pada lokasi ini banyak tersebar Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta merupakan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) perwakilan dari pulau di Indonesia sehingga diharapkan dapat mempermudah proses transportasi/distribusi / logistic kegiatan proses bisnis produk kelautan perikanan baik domestic maupun internasional.

Faktor pendukung dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut adalah beberapa Hasil Rakor lintas K/L yang telah diselenggarakan, menyepakati Indonesia dapat mengembangkan pemanfaatan Teknologi Iradiasi dan Teknologi Iradiasi bersifat multifungsi dan dibutuhkan bagi pelaku usaha.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut adalah Indonesia baru memiliki fasilitas Iradiator sebanyak 2 unit dan berada pada lokasi

yang kurang strategis secara ekonomi dan dicanangkan pembuatan kajian pengembangan pemanfaatan Teknologi Iradiasi oleh BRIN namun pimpinan BRIN kurang berkenan

Atas dasar hal-hal yang disampaikan tersebut, rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Marves perlu mendorong realisasi pengembangan teknologi iradiasi bagi produk KP di Indonesia;
2. Kemenko Marves perlu mendorong BRIN dalam pembuatan kajian atau Feasibility Study (FS) terkait dengan rencana pembangunan unit Iradiator baru dikarenakan BRIN sebagai instansi yang memiliki teknologi, SDM dengan keahlian di bidang nuklir dan pengalaman riset yang sejalan dengan bidang iradiasi;
3. Penetapan 3 (tiga) lokasi strategis diusulkan sebagai tempat pembangunan fasilitas iradiasi baru di Indonesia antara lain: Surabaya, Manado dan Medan dengan masing-masing 2 model baik dengan menggunakan Sinar Gamma dan MBE (Mesin Berkas Elektron);
4. Kemenko Marves perlu mengendorse kepada Bappenas khususnya terkait dengan penambahan anggaran dalam mekanisme proses Rancangan SNI (RSNI) produk pangan iradiasi baru yang akan diusulkan oleh K/L terkait.
5. Kemenko Marves perlu menunjuk otoritas kompeten yang mengelola fasilitas teknologi iradiasi di Indonesia.

d) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri Bagi Industri Perikanan

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri Bagi Industri Perikanan, didasari dengan deskripsi isu-isu sebagai berikut:

- Tingginya pembelian barang impor untuk pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN, sehingga Presiden menyampaikan bahwa pengadaan barang impor harus dikurangi, dan perlu upaya peningkatan belanja produk dalam negeri;
- Permasalahan distribusi logistik perikanan saat ini adalah jumlah unit reefer container masih minim bahkan tidak tersedia dan mahal di area pelabuhan perikanan terutama pada daerah terpencil/pulau-pulau kecil di Wilayah Indonesia

serta keterbatasan dan mahalnnya harga sewa untuk reefer container kapasitas ekspor;

- Produk perikanan lokal masih banyak yang tidak memenuhi syarat ekspor dan salah satu penyebabnya adalah mutu atau kualitas produk yang menurun dikarenakan kekurangan fasilitas cold storage maupun reefer container dalam proses pengangkutan;
- Telah terbangun prototipe reefer container kapasitas 1 dan 5 ton yang diproduksi oleh PT INKA (Persero) dan telah diuji cobakan pada armada kapal PT PELNI (Persero) sebanyak 2 kali dengan jumlah masing-masing 1 unit untuk kapasitas 1 dan 5 ton;
- Uji coba pemanfaatan reefer container tahap I dilaksanakan di KM Bukit Raya pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022 dilanjutkan dengan uji coba pemanfaatan tahap II pada tanggal 5 Juni 2022 sampai 18 Juni 2022 di KM Awu menunjukkan hasil yang memuaskan dimana suhu target yang diinginkan dan sistem IoT yang dipasang pada reefer container selama pengujian bekerja dengan baik;
- Telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PELNI (Persero), PT INKA (Persero), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Sinergi Sarana Logistik BUMN dan Perguruan Tinggi pada 21 Juli 2022, hal ini sebagai landasan kerja sama pemanfaatan reefer container buatan dalam negeri untuk sarana logistik dalam negeri (kapal angkutan barang dan perintis) maupun untuk kapasitas ekspor;
- Reefer container milik PT INKA (Persero) dalam waktu dekat akan melakukan kerja sama dengan PT PELNI (Persero) dalam memenuhi kebutuhan reefer container PT PELNI (Persero) dengan jumlah 62 unit untuk kapasitas 20 feet yang saat ini sedang dalam proses administrasi pengadaan;
- PT INKA (Persero) telah membangun prototipe reefer container kapasitas 20 dan 40 feet dan akan dilakukan uji coba pemanfaatannya seiring dengan adanya permintaan untuk memenuhi kebutuhan reefer container industri rantai dingin Indonesia; Ø Telah dilakukan sertifikasi TKDN untuk reefer container kapasitas 1 dan 5 ton dan sedang dalam proses persiapan pengajuan sertifikasi TKDN untuk kapasitas 20 dan 40 feet;

- Berdasarkan data kebutuhan reefer container secara nasional, diperkirakan masih ada sekitar 40% potensi proyek ini, sehingga Kemenko Marves akan mendorong optimalisasi produksi reefer container buatan dalam negeri.

Berdasarkan isu-isu tersebut, pilihan kebijakan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Adapun mengevaluasi permasalahan di atas dan berdasarkan dengan landasan hukum yang digunakan sebagai rujukan berikut merupakan dua kegiatan koordinasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Kemenko Marves dalam penanganan isu pemanfaatan produk buatan dalam negeri bagi industri perikanan adalah :

1. Dengan telah terbangunnya prototipe reefer container kapasitas 1 dan 5 ton dan telah diuji cobakan pada armada kapal PT PELNI (Persero), selanjutnya diharapkan untuk dapat segera melakukan uji coba pada reefer container kapasitas 20 dan 40 feet tentunya dengan dukungan dan kolaborasi pemerintah, badan usaha/industri terutama pihak-pihak yang bertandatangan pada Nota Kesepahaman;
2. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pemanfaatan reefer container buatan dalam negeri kapasitas 1 dan 5 ton yang dapat diperuntukkan bagi kapal-kapal nelayan guna mendukung ketahanan mutu dan kualitas ikan hasil tangkapan nelayan;

Kendala kelangkaan reefer container yang saat ini dialami Indonesia telah berdampak pada naiknya harga kontainer sampai dengan lima kali lipat serta terganggunya distribusi logistik baik di dalam negeri maupun untuk tujuan luar negeri dan kelangkaan kontainer juga telah menyebabkan meningkatnya freight cost.

Tingginya pembelian barang impor untuk pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN, sehingga Presiden menyampaikan bahwa pengadaan barang impor harus dikurangi, dan perlu upaya peningkatkan belanja produk dalam negeri sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

UMKM serta industri dalam negeri sehingga perlu untuk dilakukan pembangunan inovasi produk reefer container buatan dalam negeri untuk mendukung sistem logistik dan distribusi produk perikanan dan agro-maritim lainnya serta untuk meningkatkan kemandirian bangsa melalui peningkatan produksi dan penggunaan

produk dalam negeri sehingga Kemenko Marves khususnya di Kedeputusan Sumber Daya Maritim dapat menjadi barometer yang diandalkan seluruh pemangku kepentingan.

Dari dua hasil evaluasi atas permasalahan yang terjadi, maka dilakukan analisis lebih jauh guna mendapatkan tinjauan untuk kemudian ditemukan rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan:

1. Pararel dengan pelaksanaan uji coba pemanfaatan untuk reefer container kapasitas 20 dan 40 feet, agar segera dilakukan permohonan pengujian sertifikasi TKDN kepada P3DN Kementerian Perindustrian dan pendaftaran pada sistem e-katalog;
2. Dengan terbangunnya reefer container kapasitas 1 dan 5 ton serta 20 dan 40 feet untuk mendukung sistem logistik perikanan domestik maupun ekspor perlu keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat memperkuat sistem logistik perikanan yang terintegrasi untuk mempermudah distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra industri melalui terpenuhinya kebutuhan kontainer berpendingin sebagai dukungan terhadap sistem rantai dingin perikanan Indonesia baik untuk kebutuhan nelayan lokal maupun pelaku usaha ekspor sektor kelautan dan perikanan untuk mengatasi kendala sistem rantai dingin perikanan Indonesia;
3. Selanjutnya peran Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan industri dalam negeri terkait sangat diperlukan juga untuk dapat memperkuat sistem distribusi logistik perikanan dan komoditas agro-maritim yang terintegrasi baik untuk distribusi antar wilayah di Indonesia maupun bagi kebutuhan ekspor;
4. Dengan terbangunnya reefer container kapasitas 1 dan 5 ton serta 20 dan 40 feet produksi PT INKA (Persero), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pemberlakuan pembatasan kepemilikan reefer container impor bagi Shipping Line atau MLO asing yang akan melaksanakan usahanya di Indonesia, untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Teknis lain yang membidangi isu dimaksud;
5. Dengan demikian secara tidak langsung kami mendukung peningkatan PDB Maritim dari sisi perhubungan, yakni dukungan terhadap sistem logistik perikanan dan komoditas agro-maritim, dimana reefer container menjadi salah satu

alternatif peningkatan mutu dan kualitas produk perikanan dan kelautan agar tetap segar dengan kualitas yang terjaga sampai dengan wilayah tujuan maupun dalam masa penyimpanan. Hal ini tentunya merupakan langkah konkrit pemerintah dalam menekan penggunaan barang impor dan meningkatkan kemandirian bangsa melalui pembangunan inovasi dan pemanfaatan produk buatan dalam negeri.

9. Sasaran Strategis Sembilan (SS.9) adalah **“Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan rekomendasi kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah capaian penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan pada Tahun 2022 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan Laut Indonesia

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan Laut Indonesia, isu yang didasari adalah sebagai berikut:

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 khususnya Agenda Keenam dari 7 Agenda Pembangunan, dinyatakan dalam Arah Kebijakan dan strategi yang ditempuh terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup adalah Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut. Dalam rangka menjalankan amanat untuk melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia serta melakukan pengelolaan secara berkelanjutan, sebagai

kegiatan yang mendukung Agenda Pembangunan 2020-2024, ditetapkan suatu indikator yang digunakan sebagai alat ukur kesehatan laut Indonesia. Indikator tersebut ialah Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) yang memiliki fungsi strategis dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini dikarenakan proses pengukuran IKLI tidak hanya mempertimbangkan dimensi ekologi dan fisik semata, namun juga mengikutsertakan parameter-parameter sosial-ekonomi dalam mengevaluasi manfaat lautan atas produk dan jasa lingkungan yang diperoleh manusia. IKLI dapat disebut sebagai alat ukur kesehatan laut Indonesia yang mengadopsi kerangka Ocean Health Index (OHI). Di mana, 10 tujuan atau target utama IKLI merupakan hasil adopsi dari OHI.

Ocean Health Index (OHI) atau IKLI adalah suatu kerangka untuk mengukur kinerja pembangunan kelautan di beberapa negara dan wilayah perairan dunia. Secara global, OHI diukur setiap tahun berdasarkan tujuan, target, dan parameter yang sama untuk semua negara atau wilayah perairan. Dengan cara demikian maka OHI dan IKLI dapat dibandingkan secara spasial dan temporal sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik dan arahan untuk tindakan atau aksi secara privat.

Sebagai kegiatan yang mendukung Agenda Pembangunan 2020-2024, Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) memiliki fungsi strategis dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini dikarenakan proses pengukuran IKLI tidak hanya mempertimbangan dimensi ekologi dan fisik semata, namun juga mengikutsertakan parameter-parameter sosial-ekonomi dalam mengevaluasi manfaat lautan atas produk dan jasa lingkungan yang diperoleh manusia. Dengan memperhatikan hasil evaluasi terkait kesehatan laut Indonesia tahun 2015-2019 serta hal-hal yang terkait dengan rencana dan target yang harus dicapai untuk 5 tahun ke depan dalam RPJMN 2020-2024, Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengukur kesehatan laut dan mengevaluasi pengelolaan laut di Indonesia.

Berikut adalah upaya atau strategi untuk mendukung pencapaian target tersebut dengan dilakukan dengan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi menerbitkan Pedoman Pengukuran IKLI yang kemudian digunakan pertama kali untuk

mengukur Skor IKLI pada tahun 2020 dengan menggunakan data tahun 2019. Pedoman Pengukuran IKLI telah mulai disosialisasikan untuk dipahami secara luas di kalangan akademisi dan diharapkan dapat dikembangkan untuk mengukur kinerja pembangunan kelautan di tingkat provinsi. Perhitungan skor IKLI kemudian dilanjutkan setiap tahunnya dan tahun 2022 merupakan tahun ke-3 skor IKLI dihitung secara nasional setelah tahun 2020 dan 2021

2. Pengukuran Indeks Kesehatan Laut merupakan langkah strategis yang dapat diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah laut dan pesisir dalam memotret, memutakhirkan data, dan menganalisisnya secara integral menjadi suatu indeks keberhasilan tata kelola pembangunan dari daerah tersebut dalam mengelola laut dan pesisirnya agar sehat secara lingkungan, dan memberikan manfaat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) berpotensi menjadi salah satu Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Nasional
3. IKLI di wilayah kewenangan Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan perlindungan ekosistem laut dan pesisir melalui pengelolaan yang bertanggung jawab telah masuk dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026
4. Dengan mengadopsi Permenko Marves 6/2020 tentang Renstra Kemenko Marves Tahun 2020-2024, Provinsi DKI Jakarta ingin menjadikan Indeks Kesehatan Laut sebagai alat ukur efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Kepala DKPKP Nomor 235 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis DKPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharapkan saran & masukan terkait metode dan variabel yang digunakan dalam perhitungan dan IKLP. DKPKP akan memulai perhitungan IKLP 2021 pada Januari 2022 mendatang. Apabila perhitungan IKLP DKI Jakarta tahun 2021 sudah dapat terverifikasi pada tahun 2022, maka akan dirapatkan di tingkat Bappeda agar mendapat dukungan dari OPD lainnya yang terkait
6. Beberapa prioritas DKPKP di tahun anggaran 2023 adalah Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan dan juga Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Provinsi. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki sistem informasi kelautan dan perikanan dalam bentuk aplikasi 'JAK OCEAN' sebagai salah satu instrumen monitoring data kelautan dan perikanan secara real-time berbasis informasi

geospasial. Direncanakan akan ada penambahan fitur perhitungan IKLP pada aplikasi tersebut

7. Berikut adalah hasil perhitungan IKLI Tahun 2022:

Tabel 9. Perhitungan IKLI Tahun 2022

No	Tipe Tujuan / Variabel	IKLI 2020		IKLI 2021		IKLI 2022
		Pleminary Data 2019	Update Data 2019	Pleminary Data 2020	Update Data 2020	Date 2021
1	Sumber Pangan	7,65	7,81	9,03	9,03	8,88
2	Penikanan Artisanal	7,27	7,73	7,42	7,2	7,63
3	Sumber Produk Alam	8,64	8,16	6,36	6,36	5,92
4	Penyimpanan Karbon	7,66	7,45	8,91	8,76	10,00
5	Perlindungan Pesisir	5,05	4,76	6,01	5,71	6,10
6	Sumber Mata Pencaharian	7,29	7,37	8,13	7,11	7,36
7	Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi	8,07	8,33	5,72	5,45	5,55
8	Perlindungan Spesies dan Tempat Ikonis	8,32	4,59	6,06	6,06	6,78
9	Perairan yang Bersih	5,82	7,23	9,12	7,39	7,43
10	Keanekaragaman Hayati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total Nilai Agregat		75,79	73,44	76,76	73,06	75,65

Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam mendukung penyusunan rancangan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rakor Perkembangan dan Capaian IKLI
2. Rakor Penanganan Oil Spill di Bintan
3. Rakor Percepatan Penetapan Bisnis Proses (SOP) Penyelenggaraan Pipa dan /atau Kabel Bawah Laut
4. Rakor Progres Penetapan Bisnis Proses (SOP) Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut dan Pengalihan Perizinan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut dalam SKB antara KKP dan Kemhub
5. Rakor Monitoring dan Evaluasi Penetapan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut Setiap Triwulan
6. Rakor Progres Penyelesaian Status BMKT yang Sudah Diangkat
7. Rakor Capaian Pengelolaan Area Labuh Jangkar di Kepr
8. Rakor Pemanfaatan dan KBLI Pengampu Pasir Laut
9. FGD Program UKSfP Pemetaan Potensi Kelautan dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan
10. Rakor Persiapan dan Pelaksanaan Hari Nusantara 2022
11. Marine Spatial Planning and Services Expo 2022

Faktor pendukung dalam penyusunan rancangan kebijakan ini adalah peran setiap K/L dalam menyediakan data yang akurat. Kendala dalam penyusunan rancangan kebijakan ini adalah beberapa walidata tidak mempublikasikan data yang digunakan pada perhitungan IKLI, sehingga terkendala dalam proses pencarian data.

Tindak lanjut dari penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Publikasi hasil IKLI tahun 2020, 2021, 2022 pada awal tahun 2023
2. Pengembangan model perhitungan IKLI berbasis model dinamis, sehingga dapat dianalisis sebagai suatu proses sains
3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan dan mengimplementasikan IKLI di daerahnya untuk menilai dan mengukur tingkat kesehatan laut di provinsi masing-masing. Salah satu provinsi yang akan menerapkan IKLI tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, yang telah menuangkan Perhitungan IKLI dalam Renstra DKPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

b) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap

Penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap didasari atas identifikasi isu sebagai berikut:

- Identifikasi masalah pada sistem peizinan kapal penangkap ikan
 - Persyaratan dan mekanisme proses pengurusan yang panjang, adanya praktik pungutan liar, proses pengurusan yang manual sehingga memerlukan waktu yang lama;
 - Kurangnya pemahaman masyarakat terkait perubahan-perubahan peraturan perizinan kapal penangkap ikan;
 - Masih adanya konflik kepentingan antar instansi pengurus administrasi perizinan;
 - Belum standar dan transparansi dalam prosedur perizinan di semua daerah, apalagi di era otonomi daerah saat ini, dimana tidak sedikit pemerintah daerah memposisikan perizinan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan cenderung menimbulkan biaya-biaya tidak resmi atau pungutan liar.
- Identifikasi masalah pada awak kapal perikanan
 - Sistem perekrutan tenaga kerja yang masih bersifat nonformal (tanpa adanya kualifikasi khusus);
 - Kondisi kerja yang tidak ada aturan jam kerja;
 - Masih sedikit awak kapal yang bersertifikasi;
 - Sistem pengupahan bagi hasil yang kebanyakan merugikan awak kapal; dan
 - Kurangnya Pendidikan dan pelatihan.

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka turut serta koordinasi dan pengendalian perizinan kapal eks moratorium dan peningkatan kompetensi awak kapal perikanan antara lain:

1. Rakor Tindak Lanjut Implementasi Penangkapan Terukur pada tanggal 9 Februari 2022;
2. Rakor Perkembangan Regulasi Bidang Perikanan Tangkap pada tanggal 14 Februari 2022;
3. Rakor Penanganan Kapal Perikanan di Pelabuhan Benoa pada tanggal 22 Februari 2022;
4. Rakor Perkembangan Regulasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada tanggal 23 Februari 2022;
5. Rakor Pengembangan Soft System Kompetensi Awak Kapal Perikanan pada tanggal 10 Maret 2022;
6. Rakor dan Kunjungan Lapangan Pengaturan Kapal Perikanan di Pelabuhan Benoa pada tanggal 13-15 April 2022;
7. Rakor Pemetaan Kapasitas Awak Kapal pada tanggal 19 April 2022;
8. Kunjungan Lapangan Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Awak Kapal Perikanan di Bitung, Kupang, dan Sumba pada bulan April – Agustus 2022;
9. Rakor Implementasi STCW-F 1995 pada tanggal 18 Mei 2022;
10. Rakor Perkembangan Legislasi RanPermen-KP tentang Sistem Kontrak pada tanggal 2 Juni 2022;
11. Rakor Pengelolaan Subsidi Solar bagi Nelayan pada tanggal 8 Juni 2022;
12. Rapat Koordinasi dan Sinergitas antar K/L terkait Penanganan Permasalahan Awak Kapal Perikanan pada 15 Agustus 2022;
13. Rapat Penyusunan Rencana Inspeksi Awak Kapal Perikanan pada tanggal 18 Agustus 2022;
14. Rakor Kompetensi dan Perlindungan Awak Kapal Perikanan pada tanggal 13 September 2022.

Berdasarkan dari hal-hal yang disampaikan tersebut, alternatif kebijakan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong pemanfaatan kembali Kapal Eks Moratorium;
- 2) Melakukan pengendalian dan monitoring implementasi PP No. 85 Tahun 2021;

- 3) Koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention On Standards Of Training, Certification And Watchkeeping For Fishing (STCW) Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, Dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995);
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi peraturan terkait dengan sistem rekrutmen, pelatihan, penempatan, pendataan, dan pemulangan awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri sebagai wujud peningkatan kesejahteraan nelayan dan awak kapal.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Persyaratan dan mekanisme proses pengurusan yang panjang, adanya praktik pungutan liar, proses pengurusan yang manual sehingga memerlukan waktu yang lama;
- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait perubahan-perubahan peraturan perizinan kapal penangkap ikan;
- Masih adanya konflik kepentingan antar instansi pengurus administrasi perizinan;
- Belum standar dan transparansi dalam prosedur perizinan di semua daerah, apalagi di era otonomi daerah saat ini, dimana tidak sedikit pemerintah daerah memposisikan perizinan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan cenderung menimbulkan biaya-biaya tidak resmi atau pungutan liar.
- Awak kapal perikanan masih belum sejahtera dan terlindungi

Pencapaian proses koordinasi dan sinkronisasi perizinan perikanan tangkap dan kenelayan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sampai saat ini adalah sebagai berikut:

- Telah dikeluarkannya izin penggunaan kapal eks moratorium dalam usaha perikanan tangkap yang diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap;
- Telah dilakukan pemetaan kompetensi nelayan di beberapa daerah antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan NTT;
- Telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi implementasi Perpres No. 18 Tahun 2019 tentang STCW-F 1995 dan mendorong peningkatan kompetensi nelayan dan awak kapal perikanan melalui Pendidikan dan Pelatihan;

- Akan dibentuk Tim Inspeksi Nasional untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap awak kapal perikanan Indonesia; dan
- Terus aktif melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan industri perikanan tangkap yang berkelanjutan.

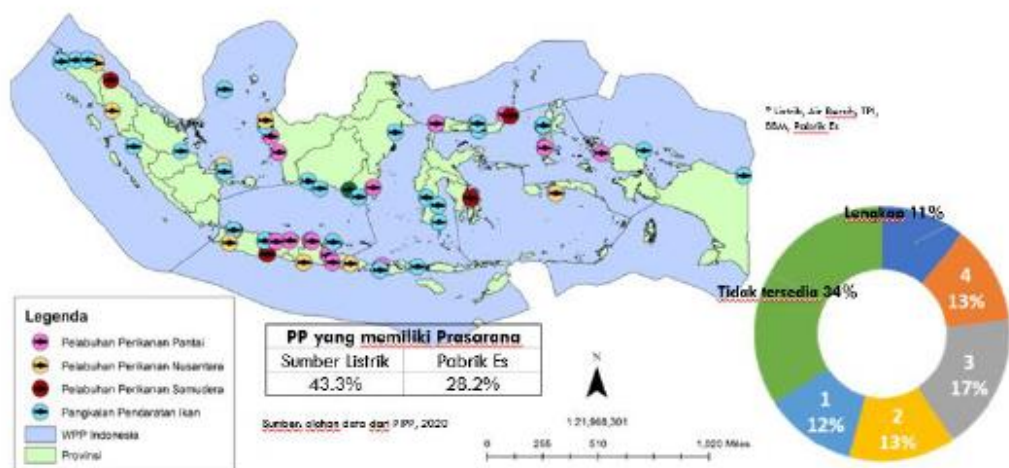
Rekomendasi yang disampaikan atas hal yang telah disampaikan tersebut adalah sebagai berikut:

- Terus melakukan perbaikan dan pembenahan sistem tata kelola perikanan tangkap termasuk tata kelola penangkapan ikan yang berkelanjutan;
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi implementasi Perpres No. 18/2019 tentang STCW-F 1995; dan
- Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kembali kapal eks moratorium.

c) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Eenergi Baru Terbarukan (EBT)

Penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan didasari atas deskripsi isu sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Logistik Produk Kelautan dan Perikanan



Gambar 6. Standar lengkap pelabuhan perikanan (PP) yaitu tersedianya listrik, air bersih, TPI, BBM, dan Cold Storage/Pabrik Es. Dari 538 PP, hanya 11% yang bersarpras lengkap.

Di sisi sarana dan prasarana logistik, tantangan yang dihadapi antara lain penyediaan sarana prasarana pergudangan di wilayah produksi, distribusi dan pasar yang perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pengiriman

hasil perikanan, informasi logistik yang belum dapat diakses secara realtime. Perbaikan sistem pasok rantai dingin pada sisi hilir perikanan mempunyai peranan penting dalam perbaikan pengelolaan hulu-hilir perikanan di Indonesia serta sistem pasok rantai dingin berperan penting untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi losses produk perikanan Indonesia serta perlunya dukungan lintas sektor dan sinergi antara pemerintah swasta dan masyarakat di dalam pengembangannya.

Mengingat produk perikanan mudah rusak satu-satunya jalan untuk produk bernilai harus dimasukkan ke dalam sistem pendingin sehingga PLTS Atap 100/200 kWp untuk Cold Storage (PLTS Atap sebagai power support) adalah salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk menangani persoalan wilayah Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik secara optimal.

2. Pembangunan Rantai Dingin Tenaga Surya Untuk Ekonomi Hijau atau Solar Cold Chains for a Green Economy (SOCOOL)

Permintaan pasokan energi yang tumbuh cepat dan tingginya konsumsi energi listrik yang berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil di sektor ketenagalistrikan, emisi CO₂ Indonesia semakin banyak dihasilkan oleh sektor energi (2017: 42%). Sektor energi diperkirakan akan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar dan dapat berkontribusi hingga 67% dari total emisi Indonesia pada tahun 2030 (skenario CM1 NDC). Sektor pendingin merupakan salah satu sub sektor permintaan listrik yang paling cepat pertumbuhannya di Indonesia. International Energy Agency memperkirakan peningkatan tajam beban sistem ketenagalistrikan untuk pendinginan (pangsa pendinginan dalam permintaan listrik puncak akan mencapai sampai dengan 30%). Terdapat potensi pengurangan emisi yang besar khususnya dalam penggunaan pendinginan di komersil dan industri (misalnya cold storage untuk industri makanan dan farmasi, pertumbuhan 10% per tahun) dimana teknologi yang tidak efisien masih digunakan. Untuk menghindari emisi GRK di masa yang akan datang, sektor pendingin menawarkan potensi besar untuk peningkatan efisiensi energi (EE) dan integrasi dengan energi terbarukan (EBT) melalui sistem tenaga surya.

Proyek SOCOOL bertujuan untuk menciptakan kondisi kerangka kerja teknologi dan pasar yang sesuai untuk pengurangan emisi CO2 jangka panjang di sektor energi dan pendinginan Indonesia. Pelaksanaanya didasarkan pada kerjasama yang erat dengan sektor swasta dan bertujuan untuk menerapkan solusi teknologi yang inovatif dan terintegrasi (energi surya, efisiensi energi untuk aplikasi rantai pendinginan) yang digabungkan dengan model bisnis siap investasi, meningkatnya diseminasi melalui perbaikan kondisi kerangka kerja dan menciptakan kapasitas produksi local untuk teknologi pendingin yang ramah iklim (misalnya cold storage yang dioptimalkan dengan tenaga surya). Proyek ini akan dikembangkan melalui kerjasama yang erat dengan pemerintah (Kemenko Marves, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)) dan integrasi kedalam struktur perencanaan nasional. Pendekatan terkoordinasi antara sektor pasokan dan permintaan rantai pendingin (misalnya perikanan) akan membuka penciptaan nilai lokal dan potensi ekonomi di wilayah timur Indonesia melalui penghindaran kerugian paska panen.

Alternatif kebijakan yang disampaikan atas dasar hal yang telah disampaikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana & Prasarana Sistem Rantai Dingin berupa dukungan terkait pembangunan Ice Slurry Maker dan PLTS Atap Cold Storage.

Dengan peningkatan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan ini diharapkan mampu menjaga keamanan ikan yang dikonsumsi masyarakat agar lebih terjamin, pengadaan dan penyimpanan ikan per wilayah/koridor lebih terjaga, dan daya saing produk dalam sistem logistik terkoneksi lebih baik. Langkah-langkah operasional pelaksanaan strategi ini salah satunya adalah fasilitasi sarana dan prasarana pengadaan yang mencakup pembangunan pabrik es, pengadaan mesin pembuat es (Ice Slurry Machine). Pentingnya es sebagai media pendinginan ikan sampai 12-18 hari sejak ikan dipanen sehingga perlu dilakukan terobosan untuk mengatasi keterbatasan teknologi, biaya, bahan baku air bersih dan daya listrik.

2. Perluasan rantai pendingin tenaga surya berdasarkan rencana induk dan strategi nasional dalam topik logistik, ketenagalistrikan dan dekarbonisasi.

Dalam pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana system rantai dingin produk kelautan dan perikanan tidak hanya difokuskan pada pembangunan cold storage dan PLTS Atap saja, namun beberapa kebijakan lanjutan perlu di dorong salah

satunya adalah untuk melakukan koordinasi antara infrastruktur pasokan energi untuk produk kelautan dan perikanan dan sektor permintaan rantai pendingin yang tersedia. Kerjasama dengan sektor swasta juga perlu didorong dengan mempertimbangkan peningkatan dan pengembangan teknologi dan litbang (pendingin tenaga surya dalam konteks Indonesia) melalui kemitraan teknologi. Integrasi penyimpanan energi cerdas dan strategi operasi yang didukung secara digital. Standar desain produksi yang baru untuk cold storage dengan solar panel (PV). Implementasi dan demonstrasi proyek. Model-model pembiayaan perlu dikaji dengan sedetail mungkin dengan mempertimbangkan peningkatan kapasitas dan ekspansi melalui pendirian manufaktur lokal Pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk insinyur, teknisi dan operator lokal serta Pengembangan pasar baik dengan lingkup peningkatan skala nasional.

Faktor pendukung dalam penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan ini adalah adanya Komitmen Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman melalui Proyek Solar Cold Chain for a reen Economy (SOCOOL). Kendala yang dihadapi dalam penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan ini adalah Implementation Agreement belum ditandatangani sehingga program belum dapat di implementasikan.

Rekomendasi yang disampaikan berdasarkan dari hal-hal yang telah disampaikan tersebut adalah:

1. Kemenko Marves perlu mendorong Peningkatan Sarana & Prasarana Sistem Rantai Dingin berupa dukungan terkait pembangunan Ice Slurry Maker dan PLTS Atap Cold Storage.
2. Kemenko Marves perlu mendorong Perluasan rantai pendingin tenaga surya berdasarkan rencana induk dan strategi nasional dalam topik logistik, ketenagalistrikan dan dekarbonisasi.

d) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, didasari atas deskripsi isu sebagai berikut: meskipun Indonesia mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar, Indonesia saat ini hanya menduduki urutan kedua sebagai negara produsen ikan tuna setelah Thailand di kawasan ASEAN, hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat

pemanfaatan baik dari segi volume maupun IPTEK penggunaan alat tangkap. Thailand saat ini menjadi negara pengekspor tuna olahan terkuat di dunia dan menguasai pasar dengan pangsa 46,75%. Selain pesaing, terdapat beberapa masalah lain berupa hambatan tarif dan non tarif yang dialami oleh komoditas ikan dan masalah kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia yang memberikan efek banyak kapal tidak beroperasi ke laut lagi. Adapun faktor lain Lebih dari 90% nelayan Indonesia adalah nelayan kecil yang menangkap ikan di daerah pesisir tersebut menjadi peluang yang besar sekaligus tantangan untuk memperkuat usaha perikanan tangkap skala kecil agar lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan (KKP, 2020).

Menurut FAO (2018) Indonesia merupakan produsen perikanan tangkap nomor 23 di dunia setelah China. Dari sektor hasil perikanan dan hasil industri perikanan Indonesia menyumbang sebesar 2,6% dari produk domestik bruto yang dihasilkan Indonesia. Sedangkan sektor budidaya perikanan menyumbang hasil produksi sekitar dua pertiga dari produksi perikanan Indonesia. Berdasarkan statistik ekspor perikanan (2021), volume hasil perikanan Indonesia dalam periode 2017 s.d. 2021 naik sebesar 3,25%. Dan kenaikan nilai sebesar 6,08% dari 2017- 2021. Adapun Indonesia, saat ini merupakan salah satu produsen ikan terbesar di dunia. Indonesia juga mempunyai potensi besar menjadi produsen sektor udang dan lobster untuk dunia. Indonesia juga menyumbang sebanyak 7% produksi ikan tangkap di seluruh dunia.

Sejak 2017 hingga 2021 sektor ekspor perikanan Indonesia terus mengalami tren positif dengan terus naik dengan kenaikan 6,08% dan nilai pada tahun 2021 mencapai USD 5.718 miliar. Sektor ekspor yang mendominasi ialah dengan produk perikanan jenis udang, tuna-tongkol-cakalang, rumput laut, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting.

Tabel 10. Volume dan Nilai Ekspor Menurut Komoditas Utama Tahun 2017-2021

Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021	Trend (%)
Udang	180.592.220	197.433.608	207.704.831	239.282.011	250.715.434	8,63
Tuna-Tongkol-Cakalang	198.151.578	188.433.759	184.130.234	195.759.299	174.764.040	4,52
Rumput laut	191.853.522	212.961.523	209.241.303	195.573.600	225.612.160	-2,52
Cumi-Sotong-Gurita	120.399.288	152.108.581	143.847.343	140.036.315	168.225.555	9,60
Rajungan-Kepiting	27.067.093	27.791.618	25.942.911	27.616.332	43.894.404	25,26
Lainnya	360.042.847	367.339.310	413.329.067	464.580.436	358.693.016	0,35
Volume (kg)	1.078.106.548	1.126.068.399	1.184.195.690	1.262.847.993	1.221.904.609	3,25
Nilai (USD)	4.524.416.249	4.860.903.582	4.935.964.801	5.205.214.009	5.718.827.844	6,08

Atas dasar hal tersebut, alternatif pilihan kebijakan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sinergi antara Otoritas Perpajakan dan Cukai dengan Stakeholder Perikanan dan Kelautan

Pemerintah selaku pembina pelaku usaha diharapkan bisa mendampingi dan menjembatani asistensi ekspor bagi para pelaku usaha dalam negeri dengan otoritas pajak dan cukai, agar potensi ekspor dari berbagai daerah di Indonesia meningkat, sehingga pelaku usaha ekspor dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya hingga pasar internasional sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tujuan khususnya pasar eropa.

Selain itu, perbaikan dari pendataan dari sisi perpajakan dan cukai terhadap para pelaku di sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan gairah sektor sektor keuangan, dalam hal ini lembaga pembiayaan dan perbankan untuk secara serius menggarap sektor ini. Saat ini persentase kredit yang diberikan untuk sektor perikanan pada tahun 2018 masih di bawah 1%, dengan nilai kurang lebih sekitar 11 triliun rupiah. Pendataan kelembagaan perusahaan, khususnya dari sisi pendaftaran legalitas termasuk untuk perpajakan dan cukai, tentu dapat meningkatkan kepercayaan dari perbankan untuk semakin meningkatkan kucuran kreditnya pada sektor ini. Lebih jauh, beberapa perusahaan pembiayaan digital yang telah resmi terdaftar (financial technology - fintech) juga secara perlahan akan masuk sektor ini. Sinergitas berbagai instansi ini, yang menaikkan angka kredit secara formal, juga diharapkan dapat mereduksi secara signifikan pembiayaan non-formal (rentenir) yang selama ini sangat merugikan para nelayan di lapangan.

2. Sinergitas Pengembangan Kawasan terkait Pengembangan Industri Terpadu Perikanan dan Kelautan

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, serta berada pada posisi strategis untuk jalur pelayaran internasional, belum sepenuhnya kompetitif khususnya dari sisi daya dukung infrastruktur pelabuhan. Saat ini sudah terdapat 538 pelabuhan perikanan, namun masih banyak yang belum beroperasi sesuai dengan kebutuhan rantai pasok industri perikanan. Strategi kedua yang diusulkan dalam makalah ini adalah perlunya fokus akselerasi revitalisasi dan pembangunan baru Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan Pelabuhan Perikanan Samudera

(PPS) sebagai kawasan industri perikanan terpadu yang terkoneksi dengan infrastruktur logistik yang lain seperti bandara, jalan tol, dan rel kereta api.

Dari sisi lokasi, Pemerintah selaku penentu penetapan lokasi pelabuhan dapat memfokuskan pengembangan di wilayah-wilayah terdepan NKRI sekaligus lumbung ikan seperti Natuna, Miangas, Morotai, Sorong, dan Kupang, atau wilayah NKRI lainnya sesuai kebutuhan. Penentuan lokasi pelabuhan PPS maupun PPN sebagai kawasan industri pengolahan perikanan terpadu yang paling utama tentu harus mempertimbangkan pasokan raw materials dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Namun demikian, sangat perlu mengevaluasi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) untuk mengevaluasi konektivitas dari supply bahan baku dengan kecepatan pengiriman menuju konsumen. Sebagai contoh, penting untuk mempertimbangkan pelabuhan perikanan untuk bisa terkoneksi langsung dengan bandara dan jalan tol. Hal tersebut diperlukan mengingat untuk ikan jenis tertentu, misalnya tuna segar, sangat diperlukan kecepatan pengiriman yang hitungannya jam demi menjaga kualitas kesegaran ikan. Kecepatan pengiriman tersebut selain berbanding lurus dengan kualitas kesegaran ikan juga berbanding terbalik dengan harga. Semakin kecil (singkat) waktu pengiriman, maka semakin tinggi harga yang akan ditetapkan oleh pembeli. Oleh karena itu, di beberapa wilayah tertentu, yang memiliki komoditas ikan segar, maka konektivitas dalam RTRW antara pelabuhan perikanan dengan bandara menjadi kunci keberhasilan industri sektor perikanan.

3. Percepatan Penyelesaian Perundingan Sektor Perdagangan Dengan Uni Eropa

Terkait dengan trend pasar perikanan Eropa, Indonesia sebagai negara produsen produk perikanan nomor 2 di dunia tentunya berpeluang untuk memenuhi sebagian dari permintaan pasar produk perikanan di Eropa. Namun tentunya hal ini tidak lepas dari kendala, misalnya masih belum tercapainya titik temu dalam perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dengan situasi ini, maka produk perikanan Indonesia masih terkendala dengan bea masuk, yang mana menjadikan produk Indonesia jadi kurang dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

Produk perikanan mentah dari negara di luar Uni Eropa dapat diterima sebagai barang impor di Uni Eropa tanpa pajak, bilamana terdapat perjanjian perdagangan bebas antara negara tersebut dengan Uni Eropa. Untuk itu perlu ditinjau progress dari perundingan terkait comprehensive economic partnership agreement (CEPA) atau perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia.

Hingga saat ini, telah dilakukan perundingan tahap ke-10 antara Indonesia dan Uni Eropa, di mana bidang maritim, perikanan dan budidaya perikanan termasuk di dalamnya. Namun demikian, luasnya cakupan perjanjian ini menjadi permasalahan tersendiri. Uni Eropa dan Indonesia memiliki cara pandang yang berbeda dalam banyak hal. Selain hambatan karena perjanjian nantinya harus disahkan oleh parlemen. Hambatan yang lain di luar masalah ekonomi ialah upaya Uni Eropa untuk menyebarkan nilai-nilainya seperti perlindungan warga sipil, hak asasi manusia dan masalah sosial melalui perjanjian perdagangan. Indonesia belum pernah memberikan komitmen yang kuat mengenai hal-hal tersebut, disamping masalah transparansi dan komitmen terhadap perlindungan alam.

4. Mengusung prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan melibatkan semua stakeholder terkait secara masif.

Dalam kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan saat ini sudah harus menerapkan prinsip pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan mulai banyak gerakan masyarakat internasional yang memiliki kesadaran dan kepedulian bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus memerhatikan keberlanjutan dan untuk keberadaan generasi mendatang. Karena, pemanfaatan sumber daya ikan sangat berkaitan erat dengan aspek kelestarian lingkungan. Saat ini, masih banyak pemanfaatan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak dan penggunaan pakan berbahaya. Hal ini akan berdampak sangat negatif bagi kesehatan manusia sudah tidak bisa lagi dibenarkan. Dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan juga harus mulai dipikirkan dengan cara berkelanjutan. dan tidak dilakukan dengan cara bertentangan hukum internasional sehingga aspek pelacakan (traceability) telah menjadi syarat dari importir atau negara tujuan ekspor bisa terpenuhi.

Traceability/Pelacakan didefinisikan oleh Codex Alimentarius sebagai “kemampuan mengikuti pergerakan makanan melalui tahap produksi, pengolahan, dan distribusi”. Dimana traceability selain berperan dalam menyediakan informasi terkait dengan persyaratan keamanan pangan, penelusuran atau pelacakan dari produk perikanan juga penting bagi pengembangan alat yang efektif untuk memberantas IUU fishing. Peraturan di Uni Eropa No 1005 tahun 2008 sudah mengatur perihal tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap perdagangan seafood di Uni Eropa harus dilakukan oleh kapal penangkapan ikan yang memiliki sertifikat penangkapan yang dikeluarkan oleh otoritas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perikanan. Saat ini Jepang, termasuk juga ikut menandatangani kesepakatan bekerja sama dengan Uni Eropa dalam memerangi IUU fishing melalui larangan impor seafood yang dianggap bermasalah.

5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Rantai Dingin

Pengembangan infrastruktur merupakan faktor penting di setiap sub-sistem yang bermuara kepada tren konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Beberapa strategi penting dalam pengembangan infrastruktur antara lain infrastruktur terkait sarana produksi seperti fasilitas tambat labuh kapal, penyediaan cold storage, hingga pergudangan sesuai dengan tingkat utilitasnya. Penyediaan infrastruktur pemasaran juga bernilai penting seperti halnya optimalisasi fasilitas jalan yang memadai. Infrastruktur yang bagus seperti jalan dan pelabuhan tentu akan mempercepat penyaluran ikan ke kota maupun dari nelayan sehingga ikan yang tersedia masih segar dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Infrastruktur lain yang diperlukan adalah pasar baik perbaikan pasar tradisional maupun modern, perbaikan TPI sehingga menarik konsumen untuk datang membeli ikan.

Pengembangan infrastruktur perikanan dengan meningkatkan fungsi dan klasifikasi jaringan jalan pada wilayah sentra utama memiliki hubungan pergerakan yang intens terhadap supply dan stok ikan hingga ke pelosok. Sehingga dibutuhkan komitmen kuat tiap pemerintah provinsi maupun kota dalam melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur perikanan sesuai dengan RT dan RW terlebih pada kawasan Minapolitan dan tetap mengacu pada regulasi yang telah berlaku di masing-masing wilayah agar pembangunan dan pengembangan lebih terarah dan tepat sasaran. Mengingat kebutuhan infrastruktur perikanan

yang begitu besar pada kawasan Minapolitan, maka diharapkan pemerintah provinsi/ kota/ pusat mampu lebih aktif dalam mencari sumber pendanaan di luar dari anggaran dalam negeri yakni dengan melakukan kemitraan dengan pihak swasta baik itu dari dalam maupun luar negeri.

Proses pendistribusian ke tingkat konsumen melewati banyak pelaku yang menyebabkan rantai distribusi semakin panjang dan semakin jauh pendistribusiannya sehingga dapat menyebabkan penurunan mutu ikan apabila tidak ditangani dengan baik. Distribusi ikan dapat melibatkan beragam jalur yang disebut rantai tataniaga. Rantai tataniaga saat ini melibatkan tujuh rantai pelaku pemasaran ikan di antaranya dua pelaku di sentra di hulu , dua pelaku jalur distribusi, dan tiga pelaku tataniaga di hilir. Hal tersebut berhubungan langsung dengan ketersediaan (stock), kesinambungan, harga, dan mutu ikan. Strategi yang dilakukan guna mengoptimalkan proses rantai distribusi antara lain: a) Pengembangan transportasi darat, laut hingga udara, b) Service delivery system, c) Teknologi cold storage.

Faktor pendukung dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut adalah produksi perikanan tangkap dan budidaya yang terus meningkat. Kendala dalam penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan ini adalah Sarpras rantai dingin dan pemasaran belum optimal.

Komoditas unggulan ekspor industri perikanan Indonesia adalah jenis udang, tuna-tongkol-cakalang, rumput laut, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting. Hal ini ditunjukkan melalui statistik perikanan dari tahun 2016-2021 dengan jumlah volume ekspor yang paling tinggi dan nilai paling besar. Komoditas perikanan yang begitu besar juga diharapkan mampu menjadi salah satu unsur ketahanan pangan nasional yang berimplikasi positif pada peningkatan konsumsi ikan nasional.

Beberapa strategi untuk meningkatkan ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia diantaranya adalah sinergi antara otoritas perpajakan dan cukai dengan stakeholder perikanan dan kelautan; sinergitas pengembangan kawasan terkait pengembangan industri terpadu perikanan dan kelautan; mengusung prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan; percepatan penyelesaian perundingan sektor perdagangan dengan uni eropa; mengusung prinsip pengelolaan perikanan

berkelanjutan dengan melibatkan semua stakeholder terkait secara masif; optimalisasi sarana dan prasarana rantai dingin.

e) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu sampai Hilir yang terintegrasi

Deskripsi isu pada Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Industri Pergaraman dan Produk Kelautan didasari atas sertifikasi, fasilitas penunjang mutu dan petugas mutu.

1) Sertifikasi

Seiring dengan meningkatnya permintaan produk perikanan Indonesia dari dunia internasional, aktivitas ekspor pun semakin meningkat. Hal itu pun sejalan dengan meningkat pula syarat yang diberikan oleh negara-negara tujuan ekspor. Sistem jaminan mutu produk perikanan yang akan ditujukan untuk ekspor harus memiliki bukti berupa sertifikasi bahwa produk tersebut terjamin kualitasnya, termasuk penanganan dalam produksinya. Namun, kendala yang dihadapi adalah jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah supplier ikan, petambak, dan kapal ikan yang telah tersertifikasi CPIB dan CBIB. Hal tersebut menyebabkan UPI tetap menerima pasokan bahan baku dari sumber-sumber yang belum memiliki sertifikasi jaminan mutu.

2) Fasilitas Penunjang Mutu

ditunjang oleh saran dan pra-sarana yang memadai. Faktor tersebut mencakup fasilitas pendaratan ikan di pelabuhan perikanan, fasilitas kebersihan, dan sanitasi. Secara garis besar, masih banyak ditemukan kekurangan fasilitas penunjang di lokasi-lokasi pelabuhan perikanan, misalnya sarana bangunan yang mulai rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kurangnya sarana pendukung kebersihan, serta fasilitas sanitasi yang kurang baik. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas ikan karena berkaitan erat dengan higienitas, yang akan menyebabkan ikan hasil tangkapan akan cepat membusuk, serta berpengaruh juga terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain itu keberadaan laboratorium uji mutu di lokasi aktivitas pendaratan ikan pun sangat diperlukan untuk menunjang penerapan sistem jaminan mutu produk kelutan dan perikanan yang baik.

3) Petugas Mutu

Faktor pendukung lainnya yang memegang peran penting adalah kecukupan jumlah petugas mutu yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil survei dan rapat koordinasi yang telah dilakukan, sebagian besar lokasi aktivitas perikanan masih kekurangan petugas mutu. Jumlah petugas mutu berpengaruh pula pada efektivitas kegiatan di lapangan, apabila petugas mutu kurang, maka akan banyak hasil perikanan yang tidak teruji kualitas mutunya. Kekurangan jumlah petugas mutu yang telah tersertifikasi diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya banyak petugas mutu yang belum mendapatkan bimbingan teknis, pemindahan tugas ke instansi lain, dan belum adanya rekrutmen penambahan petugas-petugas mutu yang baru. Dengan demikian, ketersediaan petugas mutu yang telah tersertifikasi sangat penting untuk menjadi perhatian.

Atas dasar hal-hal yang disampaikan tersebut, pilihan kebijakan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Sertifikasi

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk, sarana dan prasarana, proses dan personil serta sistem mutu. Agar setiap produk perikanan dari Indonesia bisa terjamin mutunya, salah satu cara adalah dengan meningkatkan jaminan mutu produk perikanan melalui sertifikasi mutu, penerapan ketertelusuran (traceability), serta penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan secara kelembagaan maupun dengan penerbitan peraturan.

Ketertelusuran merupakan bagian penting dalam rantai distribusi suatu produk pangan sebagai salah satu upaya bagi terjaminnya kualitas dan keamanan suatu produk dan telah diterapkan pada banyak negara. Tujuan utama dari sistem ketertelusuran adalah untuk mencatat dan mendokumentasikan suatu produk termasuk seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksinya, hingga proses pengolahan sampai produk terdistribusi kepada konsumen. Apabila sistem ketertelusuran diterapkan dengan baik, maka penolakan terhadap produk dapat dikurangi sehingga dapat menghemat pengeluaran sebuah industri pangan. Pada sisi lain, dengan terjaminnya kualitas dan keamanan suatu produk akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk

tersebut. Pelaku usaha yang telah menerapkan sistem jaminan mutu HACCP juga memungkinkan pengintegrasian sistem HACCP-nya dengan sistem ketertelusuran.

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Petugas Mutu

Petugas mutu dalam hal ini melingkupi ranah perikanan budidaya, tangkap, dan mutu tersebut. Secara garis besar, setiap bidang tersebut masih kekurangan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam bidang perikanan budidaya, jumlah auditor dan pembina masih kurang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya personil yang belum mendapat pelatihan khusus dan petugas yang terlatih berpindah instansi penugasan.

Hal yang sama pun didapati pada bidang perikanan tangkap. Berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap KKP tahun 2022, terdapat sebanyak 276 Petugas Inspeksi yang tersebar di pusat dan daerah, namun jumlah petugas tersebut masih belum sebanding dengan tugas yang harus dikerjakan di setiap sektor yang terkait, salah satunya di pelabuhan perikanan.

Pada sisi penjaminan mutu, yang dalam hal ini BKIPM sebagai Otoritas Kompeten, pelaksanaan penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) masih sering ditemukan UPI yang menerima bahan baku dari supplier yang belum memiliki sertifikasi mutu. Dengan demikian, perlu ada sistem pengawasan yang lebih baik dan juga penambahan jumlah petugas inspeksi yang mendukung kegiatan tersebut.

- Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Pra-sarana Penunjang Mutu

Dalam penerapan sistem jaminan mutu yang baik, perlu didukung oleh sarana prasarana (sarpras) penunjang yang baik pula. Namun, secara umum sarpras yang terdapat di pelabuhan perikanan (PP) masih dalam kondisi kurang baik. Sebagai contoh, di PP Lempasing Lampung, sejak didirikan di tahun 2017, PP tersebut belum pernah mengalami renovasi, hal itu terlihat dari lantai yang rusak parah, yang mengakibatkan banyaknya genangan air di sekitar bangunan yang berpotensi mengurangi higienitas hasil tangkapan.

Selain itu, perlu adanya tambahan fasilitas penunjang yang sesuai. Misalnya conveyor untuk mendistribusikan ikan dari luar ke dalam gedung, harus memiliki ukuran yang sesuai. Serta perlu adanya palet (alas) bagi ikan tangkapan, agar ikan tidak diletakkan di atas lantai.

Lebih lanjut, laboratorium uji sangat penting untuk memastikan kualitas ikan dalam keadaan baik tanpa tercemar oleh virus, bakteri, atau penyakit. Fasilitas ini idealnya terdapat di pelabuhan-pelabuhan perikanan, UPT, dan wilayah-wilayah yang dekat dengan sentra ekspor.

Urgensi penambahan lab lebih meningkat terlebih ketika pandemi Covid-19, sejauh ini hanya terdapat satu laboratorium yang berlokasi di Bogor yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian virus tersebut. Dengan demikian, perlu adanya penambahan jumlah laboratorium yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik yang tersebar di wilayah-wilayah ekspor Indonesia.

Faktor pendukung dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut adalah Sistem Jaminan Mutu Produk KP disetiap Eselon I terkait lingkup KKP sudah ada. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut adalah belum terintegrasinya Sistem Jaminan Mutu antar lintas Eselon I terkait.

Rekomendasi yang disampaikan atas hal yang telah disampaikan tersebut adalah

- Kemenko Marves perlu terus mendorong dan mendukung KKP dalam menerapkan sistem jaminan mutu melalui sertifikasi produk kelautan dan perikanan;
- Memberikan prioritas pada perbaikan sarana dan pra-sarana penunjang mutu produk perikanan;
- Memperhatikan peningkatan kapasitas dan kualitas petugas mutu perikanan

Berdasarkan analisis di atas, maka dianggap perlu untuk mendorong penerapan sistem jaminan mutu melalui sertifikasi untuk memastikan bahwa produk yang ditujukan untuk kebutuhan ekspor telah memenuhi semua aspek yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Selain itu, perlu diperhatikan mengenai sarana dan pra-sarana penunjang mutu, serta peningkatan kualitas dan kuantitas petugas mutu perikanan harus masuk ke dalam program prioritas. Kemenko Marves melalui Asdep Peningkatan Daya Saing akan terus melakukan koordinasi dengan K/L terkait, khususnya unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM). Pilihan kebijakan yang telah disampaikan di atas akan sesuai untuk ditujukan kepada BKIPM yang dalam hal ini bertindak sebagai otoritas kompeten yang berperan dalam sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan.

f) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Industri Pergaraman dan Produk Kelautan

Pada penyusunan dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Industri Pergaraman dan Produk Kelautan isu utama yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Sebagai komoditas strategis, keberadaan garam sangat vital untuk mendukung kebutuhan pangan, industri kimia dasar, farmasi, peternakan dan kebutuhan industri lainnya. Pada tahun 2022 total terdapat kebutuhan garam sejumlah 4.415.646 ton. Jumlah ini cenderung menurun daripada tahun sebelumnya yang berada di angka 4.671.700 ton. Pemenuhan akan kebutuhan garam tersebut pada tahun 2021 masih didominasi oleh aktivitas perdagangan impor. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan produsen dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Tahun 2021 dengan kebutuhan garam yang dipenuhi melalui mekanisme impor adalah 2.851.005,83 ton dan yang dipenuhi melalui kebutuhan dalam negeri adalah 1.063.086,27 ton. Pada tahun 2022 pemenuhan garam melalui kontribusi garam lokal diprediksi dan ditargetkan pada angka 1.500.000 ton dengan pemenuhan impor dialokasikan sejumlah 2.915.646 ton.

Ketidakmampuan produksi garam dalam negeri untuk menutup mayoritas kebutuhan nasional menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing produksi. Selain akibat adanya pengaruh La Nina yang menyebabkan musim basah lebih panjang, rendahnya produksi dalam negeri juga salah satunya diakibatkan oleh rendahnya adopsi teknologi yang dilakukan oleh produsen nasional. Sejauh ini terdapat tiga unsur produsen garam nasional, yaitu petambak garam, PT Garam (BUMN), dan BUMS yang lahannya berada di lahan program ekstentifikasi di Nusa Tenggara Timur.

Pada aspek pemanfaatan teknologi, permasalahan pergaraman dapat diidentifikasi secara umum terjadi akibat minimnya pemanfaatan teknologi pada sisi hulu produksi dan minimnya keberadaan teknologi pengolah hasil produksi garam lokal. Belum adanya modernisasi yang masif dalam bentuk mekanisasi peralatan ataupun penggunaan metode yang terintegrasi dengan teknologi yang lebih mumpuni dalam rangka meningkatkan target produksi hingga 100 ton/ha/tahun. Pemanfaatan teknologi pada sisi hulu produksi melalui modernisasi teknologi dan mekanisasi

dirasa perlu untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, percepatan waktu produksi garam serta kemudahan dalam pengelolaan lahan garam. Permasalahan peningkatan kualitas tidak lepas dari masih minimnya penggunaan teknologi pengolahan hasil produksi garam lokal. Beberapa pilot project yang telah dikembangkan oleh BRIN, BUMN dan BUMS dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas garam lokal menjadi garam berkualitas lebih tinggi masih terkendala optimalisasi serta kendala teknis lainnya sehingga target peningkatan kualitas dari upaya tersebut belum dapat terealisasi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2022 berperan dalam melakukan pengendalian kebijakan terhadap tata kelola pergaraman nasional. Produksi pada sisi hulu hingga tata niaga pasca panen menjadi agenda prioritas yang dilaksanakan secara paralel agar mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Secara makro, pelaksanaan pengendalian kebijakan dilakukan dari dua aspek yakni dari aspek regulasi dan implementasi. Adapun sebagai keluaran kebijakannya diharapkan tersedianya inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional.

Atas isu yang disampaikan tersebut, alternatif kebijakan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Adopsi Teknologi Produksi di Sektor Hulu

Perbaikan produksi di hulu akan menjadi kunci utama untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas produksi garam nasional. Perbaikan dapat dilakukan melalui adopsi teknologi yang dilakukan baik oleh petambak garam rakyat, PT Garam dan pihak BUMS yang melakukan ekstentifikasi garam rakyat.

Pertama, adopsi teknologi yang dapat dilakukan oleh petambak garam rakyat adalah penggunaan teknologi produksi berupa lahan terintegrasi. Hasil studi dari Bramantyo (2017) menyebutkan bahwa tambak garam rakyat di Jawa Barat dan Madura hanya berkisar 0,3 sampai 1,7 Ha/orang. Dampaknya, sebagian besar lahan tersebut belum mampu menghasilkan produk garam industri yang terstandar. Berdasarkan hasil studi dari BPPT (a.k.a BRIN) menyebutkan bahwa lahan terintegrasi terbukti efektif dalam menghasilkan garam yang berkualitas secara konsisten daripada lahan dalam jumlah petak kecil. Saat ini KKP membuat program lahan terintegrasi seluas 15 ha. sebagai cara untuk menerapkan teknologi produksi garam rakyat. Namun demikian program

ini diketahui belum masif di lapangan dikarenakan konsolidasi sosial yang sangat sulit dilakukan di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan dari sisi pemerintah adalah menetapkan langkah-langkah perencanaan secara komperhensif untuk merekayasa sosial melalui pembentukan kelembagaan ekonomi sebagai sarana konsolidasi lahan terintegrasi.

Kedua, adopsi teknologi juga perlu dilakukan pada lahan produksi PT Garam. BUMN ini memiliki lahan di Sampang kurang lebih 1200 Ha, di Pamekasan +1000 hektar, Sumenep I +1800 ha. Sumenep II +600 ha. dan Bipolo +300 ha. Saat ini metode produksi yang dilakukan di lahan pergaraman PT Garam juga masih konvensional. Hal ini dapat dilihat dari produktivitas rata-rata saat puncak tahun garam di tiap lokasi yang masih belum bisa menyentuh 150 ton/tahun. Pengerjaan produksi di PT Garam saat ini perlu dimodernisasi salah satunya dengan dan dengan mekanisme panen semi mekanisasi sebagaimana halnya korporasi modern pergaraman seperti di Australia, India, dan negara produsen garam lainnya. Transformasi lahan yang lebih mengadopsi teknologi ini tidak akan mungkin dilakukan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PT Garam. Solusinya perlu dilakukan kerjasama antara PT Garam dengan industri ekspertis pergaraman skala internasional yang telah memiliki kapabilitas dalam mengelola lahan modern.

Ketiga, adopsi teknologi hulu juga perlu ditekankan untuk lahan pergaraman ekstentifikasi di NTT. Kondisi sosial ekonomi dan politik yang ada di NTT jauh lebih mendukung aktivitas produksi pergaraman yang lebih modern melalui penggunaan lahan terintegrasi dengan skala luasan di atas 200 ha. dan penggunaan mekanisme mekanisasi dalam panen garam. Sehingga produksi garam di NTT dapat lebih optimal dan mampu menjadi basis utama pemenuhan garam jenis industri dalam negeri.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Hasil Produksi

Garam (selain untuk kebutuhan CAP dan kimia dasar) memerlukan unit mesin pengolahan untuk mengolah garam dalam bentuk kasar hasil produksi menjadi garam yang siap untuk diserap bagi industri garam konsumsi, aneka pangan, farmasi dan industri pengguna garam lainnya. Keberadaan mesin pengolahan yang unggul dan ekonomis akan menjadi perantara yang dapat mengolah kualitas garam lokal sesuai dengan kebutuhan pasar. Kurang bertumbuhnya industri pengolah garam lokal yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas garam lokal perlu

menjadi perhatian bahwa aspek produksi di hulu dapat mempengaruhi keekonomian industri pengolah.

Pemerintah melalui BPPT (yang saat ini menjadi BRIN) telah membangun unit pengolah garam rakyat berkapasitas 40.000 ton/tahun di Manyar Gresik. Pabrik ini perlu untuk segera dioptimasi dan dioperasikan secara komersil agar harapan akan adanya pemenuhan garam lokal untuk industri aneka pangan secara signifikan dapat segera terealisasi. Saat ini pabrik ini masih dalam tahap uji coba oleh PT Garam secara periodik. Hasil sementara uji coba menunjukkan kemampuan pabrik masih belum mampu bekerja secara optimum dengan kapasitas 40.000 ton/tahun dengan losses yang masih tinggi. Perbaikan dan pembaruan kerjasama antara pemerintah dalam hal ini BRIN dengan pihak PT Garam perlu segera dilakukan agar pabrik ini bisa bekerja sebagaimana fungsinya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah membuat pabrik washing plant garam rakyat yang terdapat di 7 lokasi sentra pergaraman dengan kapasitas 7000 ton/tahun. Sayangnya, pabrik ini diketahui masih belum bisa bekerja dengan optimal disebabkan oleh rendahnya pasokan atau inkonsistensi hasil produksi garam. Penekanan komitmen antara kelompok ekonomi pengelola atau koperasi yang mengelola dengan anggotanya yakni petambak garam untuk menyuplai bahan baku perlu dilakukan sehingga pada saat musim panen pabrik tersebut mendapatkan suplai.

Selain itu, pemerintah juga perlu segera melakukan scale up terhadap industri pilot project pabrik pengolah garam farmasi. Saat ini PT Karya Daya Syafarmasi merupakan perusahaan yang telah memiliki CPOOB dari Badan POM. Mereka mampu mengolah garam lokal menjadi garam farmasi dan pro analisa. Namun demikian skala produksi dari pabrik ini masih cukup kecil sehingga pemerintah perlu untuk menumbuh kembangkan industri ini ataupun memberikan dukungan terhadap scale up pabrik milik PT Karya Daya Syafarmasi.

Faktor yang mendukung dalam penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan tersebut adalah telah disahkan Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada 27 Oktober 2022. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan tersebut adalah Target Rencana Aksi P3N adalah dari tahun 2022-2024, namun pengesahan Pepres

pada Bulan Oktober 2022. Hal ini menyebabkan mayoritas K/L dan OPD belum memasukkan program dan anggaran yang mendukung Rencana Aksi Pepres 126 tahun 2022 tentang P3N.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disampaikan strategi untuk mengimplementasikan rekomendasi kebijakan guna mendukung sektor pergarahan nasional melalui adopsi teknologi produksi di sektor hulu dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pengolahan hasil produksi, antara lain:

1) Optimalisasi

- Mengintegrasikan lahan rakyat guna peningkatan efisiensi dan produksi
- Revitalisasi terhadap washing plan pengolahan pada sentra pergarahan untuk meningkatkan kualitas garam lokal
- Scale up terhadap industri pilot project pabrik pengolahan garam untuk meningkatkan kuantitas produksi.

2) Transformasi dan Modernisasi

- Modernisasi metode produksi melalui produksi meja garam berupa garam di atas garam
- Mekanisasi peralatan pada proses produksi dan pemanenan garam untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan dan produktivitas pergarahan

3) Kerjasama dan Investasi

- Mendorong BUMN untuk bermitra dengan industri ekspertis pergarahan skala internasional yang telah memiliki kapabilitas dalam mengelola lahan modern

g) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Riset dan Teknologi pada Sektor Maritim

Penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Riset dan Teknologi didasari atas deskripsi isu sebagai berikut:

yang ditangani sepanjang tahun 2022 akan kami bagi menjadi 2 klaster diantaranya sebagai berikut :

- Klaster 1: Penguatan Kerjasama Bilateral Korea dan Indonesia dalam Pengembangan dan pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Kemaritim, sekaligus dengan pengembangan kapasitas SDM dalam training-training langsung

dilapangan. Dalam klaster ini, kami telah mengkoordinasi dan mendorong sepanjang 2022 antara lain:

- Pengendalian riset-riset dalam skema Ocean ODA Cirebon, antara lain:
 - Riset dan survei pesisir Cirebon terkait mangrove dan garis pantai yang dilaksanakan MTCRC bersama ITB. Salah satu output riset ini yaitu memberikan prediksi kondisi lingkungan dalam 10 – 20 tahun mendatang yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan untuk pemerintah setempat.
 - Survei dan riset terkait nutrient and pollutant distribution di perairan Cirebon. Survei ini meliputi CTD measurement, water sampling, dan ADCP survey, yang dilaksanakan bersama oleh MTCRC bersama kelompok peneliti oseanografi dan chemistry ITB.
 - Instalasi laboratorium kimia kelautan di ITB Cirebon Watubelah, dan tambahan peralatan survei kelautan. Peralatan laboratorium ini antara lain Nutrient analyzer, FTIR spectrometer, submersible hyperspectral radiometer, Plasma Spectrometer ICP-MS, dan lain-lain. Sebagian perlengkapan telah diimpor dari Australia, Norwegia, dan Korea. Proses hibah dan serah terima akan dilaksanakan pada triwulan ke IV tahun 2022.
 - Survei, training untuk mapping area pesisir menggunakan data dan teknologi remote sensing data, menggunakan drone, GTK GNSS, Google Earth Engine, dan aplikasi GIS. Rangkaian kegiatan ini dilakukan bersama KemenkoMarves, BRIN, KemenATR, ITB, IPB, UMRAH, UNHAS, UGM, WCS, Bapelitbangda Cirebon.
 - Survei-survei yang dilakukan untuk sekaligus training pendalaman dan peningkatan pengoperasian peralatan riset, instrumen dan metodologi di lapangan antara lain terkait bathymetric, seabed, water quality, sediment sample surveys dan numerical modeling
- Pengendalian riset-riset dan aktivitas pada fase pertama dimulainya ODA pemanfaatan satelit Korea GEOKompsat 2B. Pada tahun 2021 Deputi SDM menginisiasi usulan ODA project untuk pembangunan sistem aplikasi pengelolaan perairan Indonesia menggunakan satelit geostasioner Korea, dan tahun 2022 proyek tersebut dimulai. Kickoff proyek ini telah dilaksanakan pada 31 Mei 2022, dan proses finalisasi draft Implementing Arrangement/Pengaturan Pelaksanaan sedang berjalan sejak April. Ditargetkan ditandatangani pada bulan Oktober 2022 antara Kemenko Marves bersama KHOA (Korea Hydrographic

and Oceanographic Agency), MOF (Ministry of Ocean and Fisheries Korea), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (tentatif). Beberapa pengendalian sepanjang project ini (2022-2026) antara lain:

- Membangun sistem dan inovasi teknologi informasi spasial kelautan Indonesia menggunakan satelit Chollian 2B, juga sistem utilisasi/processing data satelit, khususnya yang menjawab isu-isu terkini kemaritiman. Pembangunan dilaksanakan bertahap selama 5 tahun berjalannya proyek.
- Akuisisi data data satelit Chollian 2B disertai pembangunan infrastruktur sistem, pengadaan dan pengelolaan server untuk menyimpan data satelit, pengolahan, analisis, dan manajemennya dan peningkatan teknologi terkait.
- Survei-survei di lapangan untuk kalibrasi dan validasi (CAL/VAL), beserta pengadaan peralatan terkait. Kalibrasi dan validasi adalah metode untuk mencocokkan atau mengkonfirmasi antara kondisi dan parameter yang didapat di alam, dengan data yg didapat dari sensor remote sensing. Tanpa CAL/VAL, data satelite dan remote sensing tidak berlaku dan tidak valid.
- Survey dan riset analisis laboratorium di perairan Teluk Makassar (Pulau Lantjung, Langkai, Baranglombo) bersama MTCRC, Universitas Hasanuddin, dan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadikan Provinsi Sulsel lokasi kalibrasi dan validasi (CAL/VAL) data satelit. Kolaborasi penelitian dan pelatihan mendatangkan peneliti dan pakar dari Korea (berasal dari lembaga KIOST dan KHOA), baik kuliah umum, training lapangan, maupun analisis laboratorium menggunakan fasilitas milik Universitas Hasanuddin.
- Fasilitasi penguatan kerjasama riset kemaritiman, kelautan dan perikanan antara MTCRC dengan perguruan tinggi di Indonesia dan Korea. Penguatan kerjasama dilakukan antara melalui MoU antara MTCRC dengan PNU-Pusan National University (terkait joint research dan aktivitas bersama di bidang remote sensing, coastal engineering, environment, juga untuk sharing kebijakan, teknologi dan data yang terkait riset remote sensing), MoU dengan IPB (terkait pemanfaatan teknologi mariculture and sea farming, manajemen pesisir dan pulau kecil khususnya seaweed, pemanfaatan artificial intelligent, dan lain-lain) dan MOU dengan Unhas (terkait marine science and technology, perikanan, teknologi remote sensing termasuk ocean satellite).
- Survei monitoring dan evaluasi ICRG lanjutan, sekaligus untuk pemetaan ekosistem pendukung blue carbon. Pelaksanaan survei dan pelatihan

dilaksanakan bersama MTCRC, Universitas Udayana, berkolaborasi dengan peneliti dan profesor dari PNU (Pusan National University).

- Survey pendahuluan di Sanur, Nusa Dua, and Nusa Lembongan bersama Tim PNU, melaksanakan mapping dengan multispectral drone, survey CTD, survey radiometric dengan perangkat USSIMO untuk mendapat data spectral memakai sensor radiance and irradiance. Pengumpulan parameter dalam air dilakukan oleh penyelam professional untuk benchmark objek-objek seperti coral reefs, seagrass, pasir dan batu untuk memperoleh data spectral.
- Survey ICRG di Nusa Dua dan Buleleng, melaksanakan pengukuran CTD measurement, water sample, dan Aerial benthic mapping menggunakan drone yang dipasang sensor multispectral dan RGB. Metode yang digunakan berbeda dengan kegiatan ICRG 2020, dimana hasil-hasil survei, mapping, benthic, dan lain sebagainya akan dikombinasikan dengan teknologi remote sensing satelit juga hasil olahan dari tim PNU, sehingga dapat mengembangkan riset-riset yang lebih mendalam.
- Pengusulan project dan riset kemaritiman kepada pihak Korea melalui MTCRC, antara lain:
 - Pengusulan pembangunan SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS dan dashboard yang bertujuan agar dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi melalui pemilihan kebijakan yang tepat sasaran tentunya dibutuhkan data yang akurat, database yang valid serta analisis yang lebih mendalam, yang semuanya dapat disediakan oleh sebuah Sistem Informasi Geografis.
 - Pengusulan ODA Project “Smart Aquaculture Technology and Facility Support for Seaweed and Napoleon Fish in Indonesia” kepada Korea, yang bertujuan untuk modernisasi fasilitas akuakultur rumput laut, pengembangan teknologi marikultur, dan program peningkatan kapasitas di bidang akuakultur
- Klaster 2: Pemanfaatan Riset dan Inovasi Terapan Dalam Mendukung Pemanfaatan Kebutuhan Nasional.
 - Mendorong pengembangan kincir air tambak buatan dalam negeri 1 Fase untuk tambak udang dan ikan skala kecil. Kolaborasi bersama Poltek KP Sidoarjo, PT Barata, KKP, Kemenperin, BSN dan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya.

- Mendorong pengembangan kincir air tambak buatan Dalam Negeri 3 Fase dengan nilai kandungan lokal sebesar 40.03% untuk tambak udang/bandeng skala kecil. Kolaborasi bersama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PT. Om Hwahaha, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standarisasi Nasional dan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya. Sebagai informasi tambahan, produk ini kami dorong dan telah dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 1.300 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
- Mendorong pengembangan kincir air tambak buatan Dalam Negeri (3 Fase) dengan nilai kandungan lokal sebesar 40.07% untuk tambak udang skala industri. Kolaborasi bersama PPNS Surabaya, PT. BBI, PT. Om Hwahaha, Kemenperin, KKP, BSN dan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya.
- Mendorong penggunaan teknologi IoT (Internet of Things) dengan fokus meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan nelayan kecil dengan solusi smart fishing. Alat ini akan memperlengkapi nelayan kecil dengan perangkat Vessel Multi Aid (VMA), yaitu perangkat onboard yang dipasang di kapal nelayan dengan berbagai fitur navigasi dan keselamatan termasuk notifikasi SOS juga fitur-fitur untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu juga dilengkapi dengan Integrated Online System yang dapat memantau pergerakan seluruh kapal secara real-time; sistem notifikasi seperti kapal keluar masuk pelabuhan; juga berbagai bentuk laporan pergerakan dan produksi yang dapat menjadi salah satu sistem pendukung pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah setempat.
- Mendorong pengembangan dan pemanfaatan kontainer berpendingin (reefer container) dalam negeri kolaborasi antara PT. Industri Kereta Api (INKA), PT. Pelayaran Indonesia (PELNI) dan Perguruan Tinggi. Hasil inovasi ini telah diujicobakan dan dimanfaatkan oleh PT. Pelni pada KM. Awu dan KM. Bukit Raya.
- Mendorong pengembangan dan pemanfaatan offshore pipe, valve dan pompa hasil research and development hasil kolaborasi industri pengecoran logam dalam negeri dengan berbagai pihak untuk menunjang industri di bidang kemaritiman (perkapalan, offshore oil and gas, dan lain sebagainya). Kolaborasi dilakukan bersama dengan Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO) dan Kemenperin.

- Fasilitasi tindak lanjut Joint Study Agreement (JSA) antara Pertamina dan ExxonMobil dalam hal pengkajian dan penerapan teknologi Carbon Capture & Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) di tiga wilayah migas meliputi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Jawa Barat.
- Mendorong pengembangan produk baterai lithium buatan dalam negeri oleh PT. Intercallin. Selanjutnya produk baterai lithium dalam negeri akan dimanfaatkan pada kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan event G20 di Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, pilihan kebijakan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Klaster 1: Penguatan Kerjasama Bilateral Korea dan Indonesia dalam Pengembangan dan pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Kemaritiman, sekaligus dengan pengembangan kapasitas SDM dalam training-training langsung dilapangan. Terdapat pilihan kebijakan diantaranya:
 - Melakukan pengawalan terhadap rencana dan komitmen yang telah disusun, dan meneruskan program-program yang telah berjalan baik pada tahap-tahap berikutnya.
 - Melakukan pengawalan secara intensif terhadap draf naskah perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan, terutama untuk Pengaturan Pelaksanaan (IA), agar komitmen yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjaga hubungan baik bilateral kedua negara dan nama baik institusi Kemenko Marves.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inisiasi dan kerjasama yang telah dilakukan baik melalui perguruan tinggi, badan riset, pemerintah daerah dan lembaga riset antar negara.
 - Merencanakan, mengusulkan, memonitor dan mengendalikan pemanfaatan riset dan inovasi agar dapat memberi manfaat secara lebih luas, dengan berkolaborasi dengan K/L/D yang terkait.
- 2) Klaster 2: Dalam Hal Pemanfaatan Riset dan Inovasi Terapan Dalam Mendukung Pemanfaatan Kebutuhan Nasional, terdapat pilihan kebijakan diantaranya:
 - Mendorong kolaborasi n-Helix yang melibatkan pihak-pihak akademisi, pemerintah, industri, asosiasi dan pemangku kepentingan yang lain.

- Kerjasama tersebut sedapat mungkin tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) dan sedapat mungkin dilakukan uji terap prototipe pada daerah tertentu pada sentra-sentra industri yang terkait.
- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan uji terap prototipe hasil riset
- Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Bidang kemaritiman dan juga mendorong jiwa Bangsa Buatan Indonesia melalui teknologi buatan anak bangsa yang memiliki TKDN tinggi

Faktor yang mendukung dalam penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan tersebut adalah arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan iptek 2020-2024 akan berfokus pada peningkatan akselerasi ekosistem riset dan inovasi. Lalu peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang, prioritas rencana induk riset nasional, yang diharapkan bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat. Peran Kemenko Marves dalam mendukung kebijakan ini yaitu mendorong kolaborasi n-Helix yang melibatkan pihak-pihak akademisi, pemerintah, industri, asosiasi dan pemangku kepentingan yang lain. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan ini adalah belum optimalnya business matching antara periset dan pelaku industri.

Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Sebagian besar laut masih merupakan misteri bagi dunia ilmu pengetahuan, sedangkan porsi penelitian dan penggunaan teknologi untuk bidang kemaritiman, masih relatif kecil dibanding penelitian berbasis sistem di daratan. Terdapat 'gap' ilmu pengetahuan yang terbuka sangat lebar untuk di-eksplorasi lebih jauh, mulai dari oseanografi, lingkungan hidup, iklim dan cuaca, geologi dan mineral, biodiversitas, perikanan, hingga pencemaran. Penelitian dan eksplorasi di bidang ini menuntut penggunaan teknologi dan peningkatan kapasitas manusia, dan harus didorong dengan berkolaborasi dengan semua pihak baik di Indonesia maupun negara lain.
- Riset dan inovasi arus terus didorong agar segera menjadi tulang punggung kebijakan nasional untuk mendukung ekonomi nasional, yang erat kaitannya dalam mendukung visi dan misi program-program presiden dalam agenda ekonomi hijau dan ekonomi biru kedepan.
- Untuk riset terapan, akan terus didorong Business Matching antara hasil riset institusi/lembaga pendidikan dan penelitian dengan industri, agar dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan di masa depan serta siap untuk bersaing di pasar global.

- Peleburan dan transformasi lembaga-lembaga riset ke dalam satu lembaga BRIN, merupakan tantangan sangat besar namun sekaligus merupakan peluang untuk peningkatan kapasitas bangsa Indonesia dalam litbangjirap disegala bidang, termasuk dunia kemaritiman.

h) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan

Pada penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan, isu yang ditangani adalah (1) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional, dan (2) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng.

Hal yang mendasari perlunya integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional adalah masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap, jaringan sistem pemasaran produk perikanan Internasional belum memiliki, dukungan infrastruktur produksi belum optimal, dan tata kelola Perikanan yang masih harus ditingkatkan. Sehingga, dengan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, diharapkan dapat (1) mewujudkan Indonesia sebagai produsen perikanan utama dunia dengan fasilitas Internasional; (2) meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024, dan; (3) meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024. Dalam rangka merevitalisasi tambak di Kawasan sentra produksi udang dan bandeng, tujuan utama penanganan Major Project ini adalah agar Indonesia menjadi salah satu negara produsen utama Udang dunia dimana saat ini Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga. Hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya pemanfaatan lahan budidaya air payau yang baru sekitar 715.000 hektar (24%) dari potensi lahan yang mencapai yang seluas 2,9 juta hektar, dimana luas lahan yang dimanfaatkan, sebesar 60 % merupakan tambak tradisional. Oleh karena itu, upaya – upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya menjadi 10,32 Juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh 8,5 persen per tahun serta meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8 persen per tahun.

Dalam penyelenggaraan dan pemantauan Major Project tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim juga menjadi inisiator kerja sama internasional

dengan meluncurkan Ocean20. Ocean 20 (O20) merupakan salah satu bagian dari kepresidenan G20 Indonesia dimana inisiatif ini meuncul dari sejarah panjang dalam pengelolaan laut. Inisiatif Ocean20 bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi kerja sama yang dapat ditindaklanjuti, berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh masing-masing kepresidenan bergilir, untuk memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi laut sambil melindungi, memulihkan, dan meregenerasinya. O20 menyediakan platform bagi perusahaan global terkemuka dunia, negara-negara G20 dan suara masyarakat sipil untuk membuat dan mewujudkan komitmen terhadap laut yang berkelanjutan dan inklusif – dan untuk meningkatkan peluang pasar dalam ekonomi laut.

Dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim terkait Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional dan Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemantauan dan pengendalian penyusunan Juklak Simplifikasi Izin Usaha Tambak Udang untuk kemudahan berinvestasi, pengembangan Model Penataan Kawasan Tambak Terintegrasi dengan jaringan Irigasi, Tandon dan IPAL komunal, dan penetapan lokasi prioritas yang tetap dilengkapi dengan Masterplan dan DED

Pemanfaatan lahan budidaya sampai dengan tahun 2019 baru mencapai 715.846 ha atau sekitar 24,14 persen dari potensi indikatifnya yang seluas 2,9 juta ha (Bappenas, 2020). Dari luas lahan yang dimanfaatkan itu, sebesar 60% merupakan tambak tradisional atau sebesar 429.507 ha untuk komoditi udang dan bandeng. Sedangkan untuk tambak udang eksisting seluas 300.501 ha, terdiri dari intensif (9.055 ha), semi intensif 43.643 ha dan tambak tradisional 247.803 ha. Tambak-tambak tradisional inilah yang butuh penataan karena cenderung memiliki infrastruktur buruk dan tata letak yang tidak beraturan.

Penataan Kawasan budidaya berbasis kluster memungkinkan pengelolaan dan penerapan biosecurity dengan mudah. Salah satu program pemerintah sesuai arahan RPJMN tahun 2020-2024 dalam Major Project yakni merevitalisasi Kawasan perikanan budidaya melalui rehabilitasi saluran irigasi untuk tambak udang.

Program revitalisasi difokuskan di Sukamara, Aceh Timur, Cianjur, Lampung Selatan dan Aceh Tamiang. Rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang vanamme dilakukan di Takalar, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Dan untuk penyusunan DED tambak udang yakni Sukamara, Aceh Timur, Cianjur dan Lampung selatan. Sedangkan rehabilitasi saluran irigasi tersier untuk tambak windu akan dilakukan di Kutai kartanegara dan Pinrang .

Sedangkan untuk program silvofishery dilakukan di Lampung Selatan. Pelaksanaan revitalisasi harus dilakukan dengan unsur kehati-hatian berbasis keberlanjutan terhadap lingkungan. Rencana pemerintah target luasan tambak yang akan direvitalisasi sampai dengan tahun 2024 seluas 295.501 ha yang terdiri dari luasan tambak tradisional (242.803 ha) dengan produktivitas 0,6 ton/ha/thn, tambak semi intensif (43.643 ha) dengan produktivitas 10 ton/ha/thn dan intensif (9.055 ha) dengan produktivitas 30 ton/ha/thn.

Shrimp state ini merupakan pemodelan skema budiadaya udang dengan skala besar yang dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir yang berada dalam suatu Kawasan. Prinsip dasar dari pemodelan shrimp estate mencakup integrasi level input produksi, produksi, pengolahan, pemasaran/perdagangan.

Pemerintah di tahun 2021, telah melakukan kolaborasi dengan Pemerintah daerah Kebumen untuk pengembangan Kawasan budidaya udang yang terintegrasi (shrimp estate) di wilayah tersebut dengan mulai membangun 100 ha tambak udang modern.

Program modelling pengembangan kawasan tambak terintegrasi dibuat dengan meningkatkan teknologi tambak tradisional menjadi suprintensif seluas 5000 ha dan penambahan lahan baru 6.000 ha dengan target produktiftas sebesar 80 ton/ha/tahun. Untuk program modelling rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 – 2024. Calon lokasi modelling di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, NTT, NTB, sulawesi tenggara dan Maluku

2) Penajaman program terkait pelaksanaan Ocean20 tahun 2023 pada Presidensi India di tahun mendatang

Inisiatif Ocean20 bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi kerja sama yang dapat ditindaklanjuti, berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh masing-masing kepresidenan bergilir, untuk memacu investasi

dan pertumbuhan ekonomi laut sambil melindungi, memulihkan, dan meregenerasinya. O20 menyediakan platform bagi perusahaan global terkemuka dunia, negara-negara G20 dan suara masyarakat sipil untuk membuat dan mewujudkan komitmen terhadap laut yang berkelanjutan dan inklusif – dan untuk meningkatkan peluang pasar dalam ekonomi laut.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dan agenda 2 “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Dari uraian di atas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- Pemantauan dan pengendalian penyusunan Juklak Simplifikasi Izin Usaha Tambak Udang untuk kemudahan berinvestasi, pengembangan Model Penataan Kawasan Tambak Terintegrasi dengan jaringan Irigasi, Tandon dan IPAL komunal, dan penetapan lokasi prioritas yang tetap dilengkapi dengan Masterplan dan DED;
- Pemantauan dan pengendalian pengembangan Pelabuhan perikanan terintegrasi untuk peningkatan produksi hasil perikanan tangkap;

- Penajaman program terkait pelaksanaan Ocean20 tahun 2023 pada Presidensi India di tahun mendatang;
- Penyelarasan program untuk keberlangsungan Isu Kelautan secara Global terus digaungkan demi kebaikan dan keberlanjutan penanganan isu – isu kelautan.

3.1.4 Learning and Growth

3. Sasaran Strategis Sepuluh (SS.10) adalah **“Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi***

Indikator ini menggambarkan capaian persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah sesuai dengan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah sesuai dengan posisi/jabatan yang dimiliki.

Sepanjang tahun 2022 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pengembangan kompetensi SDM pada Lingkup Deputy adalah sebagai berikut:

- 1) Bimtek Aplikasi SIK-Marves yang dilaksanakan pada Trwulan I pada 30 Maret – 1 April 2022;
- 2) Pelaksanaan Workshop Manajemen SPBE pada Triwulan I 28 – 30 Maret 2022;
- 3) Bimbingan Teknis Penyusunan KAK dan RKA-K/L TA 2023 yang dilaksanakan pada 6-8 April 2022;
- 4) Workshop Fotografi dan Bimbingan Teknis Integrasi Standar Pelayanan Terpusat pada Triwulan 2 yaitu 11-14 April 2022;
- 5) Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional pada 21-23 April 2022;
- 6) Workshop Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko SPBE pada 24 Juni 2022;
- 7) Bimbingan Teknis Penyusunan RKAKL TA 2023 pada 27-29 Juni 2022;
- 8) Bimtek Pelaporan terkait penyusunan laporan kinerja dan laporan bulanan pada 19-20 Juli 2022;
- 9) Workshop Melukis Infografis yang dilaksanakan pada 6 – 7 Juli 2022;
- 10) Bimbingan Teknis terkait Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang dilaksanakan pada 8 – 9 September 2022;
- 11) Workshop Penyusunan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan pada 7 September 2022; dan

- 12) Evaluasi Data Dukung SPBE dan Sosialisasi Data Sektoral Bidang Kemaritiman pada 7-9 November 2022.
- 13) Pada tahun 2022 Deputi SDM telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berguna untuk pengembangan kompetensi SDM lingkup Deputi
4. Sasaran Strategis Sebelas (SS.10) adalah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif”** dengan indikator kinerja ***Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian nilai evaluasi internal SAKIP dan serta persentase pelaksanaan PMPRB pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Tahun 2022.

Pada 8 – 9 September 2022 telah dilakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim bersama tim Inspektorat. Pada 14 September 2022 telah dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang dikeluarkan oleh Tim Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan penilaian Tim Inspektorat, pada Tahun 2022 untuk penilaian SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mencapai nilai 75,87 dengan indikator BB. Berikut adalah detail dari penilaian tersebut:

No	Komponen	2021		2022	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	43	32,02	35	27,51
2	Pengukuran Kinerja	36	27,98	30	22,66
3	Pelaporan Kinerja	21	15,97	20	14,54
4	Evaluasi Internal	N/A	N/A	15	11,16
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,97	100	75,87
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB		BB

Dalam pelaksanaan RB, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim nilai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2022 mencapai nilai sebesar 33,58 dari total bobot 36,30 dan persentase ketercapaiannya yaitu 92,51%. Persentase ketercapaian pada Tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan persentase

ketercapaian pada Tahun 2021 yaitu sebesar 91,21% naik sebesar 1,3%. Berikut adalah detail penilaian pelaksanaan RB Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
I.	PEMENUHAN	14.60	13.28
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00	1.82
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1.00	0.75
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2.00	2.00
4	PENATAAN TATALAKSANA	1.00	1.00
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1.40	1.29
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50	2.31
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2.20	2.08
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50	2.03
III.	REFORM	21.70	20.30
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00	3.00
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2.00	2.00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1.50	1.50
4	PENATAAN TATALAKSANA	3.75	2.63
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2.00	1.75
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75	3.72
7	PENGUATAN PENGAWASAN	1.95	1.95
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75	3.75
TOTAL PENGUNGKIT		36.30	33.58

5. Sasaran Strategis Duabelas (SS.12) adalah **“Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel”** dengan indikator kinerja ***Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, selain itu untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan target capaian pada tahun 2022 sesuai dengan PK Deputy SD Maritim sebesar 97. Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D. Untuk nilai IKPA 2022 sementara adalah 86.54.

Sepanjang Tahun 2022, realisasi penyerapan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah Rp. 17.132.235.829 dengan persentase capaian 99,82% dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 17.162.460.000. Capaian output berdasarkan dari nilai realisasi yang didapat juga telah 100% dilaporkan. Lalu kemudian terdapat 924 berkas keuangan yang telah diselesaikan proses pertanggungjawaban keuangannya, terdapat 0 pengembalian berkas dari bagian keuangan Biro Umum, terdapat 26 data

berkas kontraktual dan serta 0 berkas kesalahan SPM. Dalam pengelolaan anggaran Tahun 2022 terdapat 1 kali Revisi DJA serta 7 kali revisi POK.

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ditetapkan pada tanggal 17 November 2021 dengan nomor: SP DIPA – 120.01-350494/2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.226.990.000,- yang kemudian anggaran tersebut tersebar di 6 (enam) unit Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategi Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan kepada setiap K/L Nomor: S-1088/MK.02/2021 dan Nomor: S-458/MK.02/2022, pada Tahun 2022 diberlakukan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga sebagai langkah mitigasi terhadap dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan anggaran efektif Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Pagu Efektif Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Setelah Blokir

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp3.500.000.000	Rp359.249.000	Rp3.140.752.000
2	Kroordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp2.800.000.000	Rp338.377.000	Rp2.461.623.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp2.700.000.000	Rp324.074.000	Rp2.375.926.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp2.250.000.000	Rp297.200.000	Rp1.952.800.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp2.250.000.000	Rp300.639.000	Rp1.949.361.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp1.526.990.000	Rp136.108.000	Rp1.390.882.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp2.200.000.000	Rp208.884.000	Rp1.991.116.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp17.226.990.000	Rp1.964.530.000	Rp15.262.460.000

Selanjutnya guna mendukung kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dalam pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis terdapat pergeseran anggaran sehingga pagu efektifnya berubah menjadi seperti pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15. Pagu Efektif Setelah Pergeseran Anggaran

NO	KEGIATAN	PAGU EFEKTIF SETELAH BLOKIR	PERGESERAN ANGGARAN	PAGU EFEKTIF SETELAH PERGESERAN ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp3.140.752.000	(-) Rp50.000.000	Rp3.090.752.000
2	Kroordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp2.461.623.000	(-) Rp80.000.000	Rp2.381.623.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp2.375.926.000	(-) Rp50.000.000	Rp2.325.926.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp1.952.800.000	(+) Rp130.000.000	Rp2.082.800.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp1.949.361.000	(-) Rp50.000.000	Rp1.899.361.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis	Rp1.390.882.000	(+) Rp130.000.000	Rp1.490.882.000

NO	KEGIATAN	PAGU EFEKTIF SETELAH BLOKIR	PERGESERAN ANGGARAN	PAGU EFEKTIF SETELAH PERGESERAN ANGGARAN
	Nasional Bidang Sumber Daya Maritim			
7	Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp1.991.116.000		Rp1.991.116.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp15.226.460.000		Rp15.262.460.000

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.2/2022 25 Oktober 2022, perihal permohonan pengajuan pembukaan blokir *Automatic Adjustment* (AA) Kemenko Marves TA 2022. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1.900.000.000 untuk penyelenggaraan Forum Kelautan Global (*Ocean20*) dan mendukung Presidensi G20 Indonesia. Berikut merupakan pagu anggaran setelah dilakukan pembukaan blokir *Automatic Adjustment*:

Tabel 16. Pagu Efektif Setelah Pembukaan Blokir AA

NO	KEGIATAN	PAGU EFEKTIF SETELAH BLOKIR	PAGU EFEKTIF SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	PEMBUKAAN BLOKIR AA	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp3.140.752.000	Rp3.090.752.000		Rp3.090.752.000
2	Kroordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp2.461.623.000	Rp2.381.623.000		Rp2.381.623.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp2.375.926.000	Rp2.325.926.000		Rp2.325.926.000
4	Koordinasi Penigkatan Daya Saing	Rp1.952.800.000	Rp2.082.800.000		Rp2.082.800.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp1.949.361.000	Rp1.899.361.000		Rp1.899.361.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp1.390.882.000	Rp1.490.882.000	Rp.1900.000.000	Rp3.390.882.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp1.991.116.000	Rp1.991.116.000		Rp1.991.116.000

NO	KEGIATAN	PAGU EFEKTIF SETELAH BLOKIR	PAGU EFEKTIF SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	PEMBUKAAN BLOKIR AA	PAGU EFEKTIF
JUMLAH ANGGARAN		Rp15.262.460.000	Rp15.262.460.000	Rp1900.000.000	Rp17.162.460.000

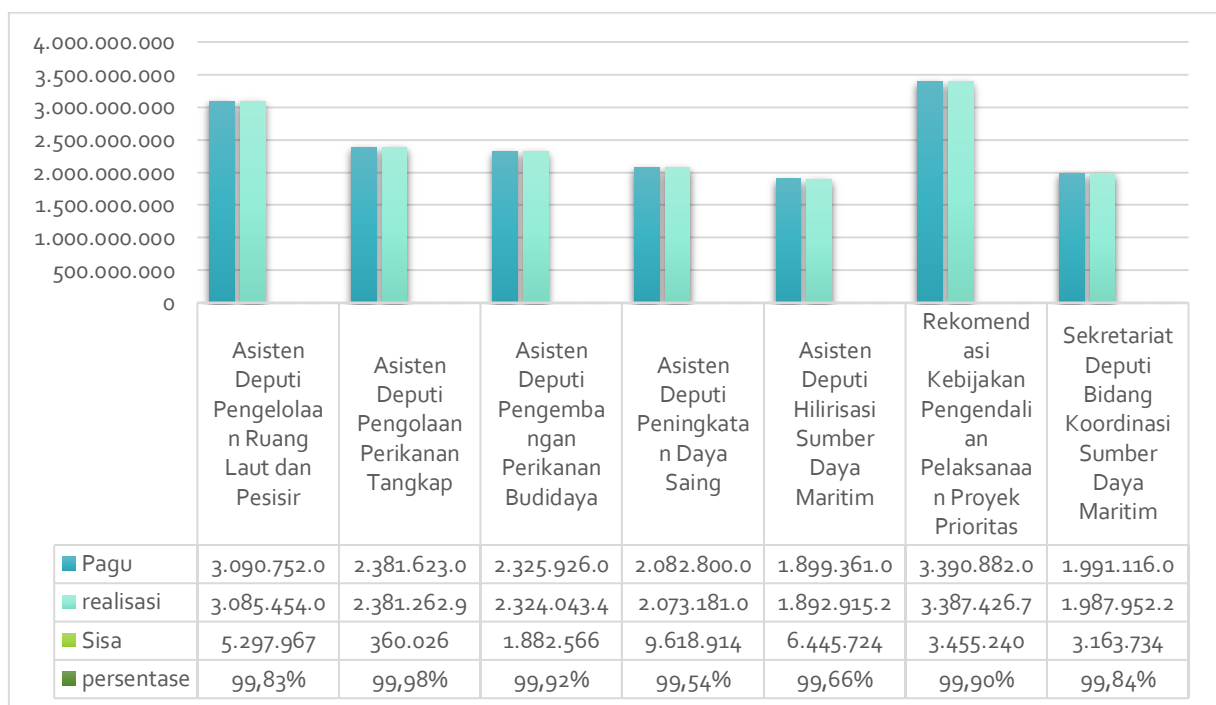
Berikut adalah data realisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim hingga 27 Desember 2022 berdasarkan data dari sistem Aplikasi Sakti:

Tabel 17. Data Realisasi TW III Tahun 2022

Keterangan	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	Sisa	%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (4831 dan 5601)	17.226.990.000	17.162.990.000	17.132.235.829	30.224.171	99,82
4831 Koordinasi Sumber Daya Maritim	15.026.990.000	15.171.344.000	15.144.283.563	27.060.437	99,82
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	3.500.000.000	3.090.752.000	3.085.454.033	5.297.967	99,83
Rekomendasi Kebijakan Implementasi Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1.500.000.000	1.268.926.000	1.268.900.774	25.226	100,00
Rekomendasi Kebijakan Penataan Ruang Laut Daerah dan Kawasan Laut	1.000.000.000	776.058.000	775.546.598	511.402	99,93
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan	1.000.000.000	1.045.768.000	1.041.006.661	4.761.339	99,54
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.800.000.000	2.381.623.000	2.381.262.974	360.026	99,98
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap	1.200.000.000	697.878.000	697.865.413	12.587	100,00
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	800.000.000	987.139.000	987.111.423	27.577	100,00
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	800.000.000	696.606.000	696.286.138	319.862	99,95
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	2.700.000.000	2.325.926.000	2.324.043.434	1.882.566	99,92
Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang	900.000.000	757.192.000	756.510.628	681.372	99,91
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan	900.000.000	797.300.000	796.563.676	736.324	99,91
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Input Produksi, Sarana dan Tata Kelola Budidaya	900.000.000	771.434.000	770.969.130	464.870	99,94
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	2.250.000.000	2.082.800.000	2.073.181.086	9.618.914	99,54
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan	750.000.000	669.030.000	662.574.390	6.455.610	99,04
Rekomendasi Kebijakan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	750.000.000	806.290.000	804.498.323	1.791.677	99,78
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	750.000.000	607.480.000	606.108.373	1.371.627	99,77
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	2.250.000.000	1.899.361.000	1.892.915.276	6.445.724	99,66
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pegaraman dan Marine Bioproduct	787.500.000	667.295.000	661.255.368	6.039.632	99,09
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan dan Jaminan Usahanya	787.500.000	649.378.000	649.170.696	207.304	99,97
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Ilmu Pengetahuan, Ristek dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	675.000.000	582.688.000	582.489.212	198.788	99,97
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	1.526.990.000	3.390.882.000	3.387.426.760	3.455.240	99,90
5601 Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2.200.000.000	1.991.116.000	1.987.952.266	3.163.734	99,84
Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	210.347.000	103.629.000	103.599.675	29.325	99,97
Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	889.653.000	867.191.000	866.775.468	415.532	99,95

Keterangan	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	Sisa	%
Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	550.000.000	552.130.000	549.754.112	2.375.888	99,57
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	400.000.000	282.219.000	282.100.411	118.589	99,96
Laporan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	150.000.000	185.947.000	185.722.600	224.400	99,88

Dari table data realisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada 27 Desember 2022 mencapai 99,82% yaitu Rp17.132.235.829 dari pagu efektif sebesar Rp.17.162.460.000, berikut adalah grafik pagu, capaian realisasi dan sisa anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TW IV Tahun 2022:



Pada grafik realisasi tersebut diketahui bahwa pada TW IV, unit kerja eselon II dengan penyerapan anggaran tertinggi adalah pada Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan persentase capaian realisasi 99,98%, yang kemudian persentase penyerapan tertinggi berikutnya adalah Unit Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya dan Unit Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir dengan persentase capaian realisasi masing-masing 99,92% dan 99,98%. Capaian realisasi terendah yaitu pada Unit Asisten Deputy Hilirisasi Sumber Daya Maritim sebesar 99,66%. Pengelolaan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim sudah maksimal dimana rata-rata realisasi anggaran mencapai 99,82%.



BAB
4

PENUTUP

Pada Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah mencapai hal-hal sebagai berikut:

- SS.1: Capaian Nilai IKLI pada Tahun 2022 adalah 75,65. Berdasarkan pada Target PK, persentase capaian Nilai IKLI adalah 99,54% (Target PK 76) dan untuk persentase capaian pada SIK-M adalah 101,17%.
- SS.2: Capaian Produksi Perikanan yang berkelanjutan pada Tahun 2022 adalah 86.13%. Jika dibandingkan dengan Target PK 2022 yaitu 80% maka capaian persentasenya adalah 107,66% dan persentase capaian pada aplikasi SIK-M adalah 113.96%
- SS.3: Capaian Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir pada Tahun 2022 adalah 103,85%. Secara matematis, persentase capaian jika dibandingkan pada target dalam dokumen PK (80%) capaiannya sebesar 129,81%. Lalu kemudian capaian pada dokumen Sik-M adalah sebesar 101,69%.
- SS.4: Capaian Persentase Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 adalah 97,42% Persentase capaian yang dicapai jika dibandingkan dengan target PK (80%) adalah sebesar 121,78%.Persentase capaian pada SIK-M adalah 122,78%.
- SS.5: Capaian Persentase Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2022 adalah 80,9%. Persentase capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada Dokumen PK (80%) adalah 101,13% dan persentase capaian pada aplikasi SIK-M adalah 110,13%.
- SS.6: Capaian Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan pada Tahun 2022 adalah 80,08%. Persentase capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada Dokumen PK (80%) adalah 100,1% dan persentase capaian pada SIK-M adalah 108,98%.
- SS.7: Capaian Persentase Capaian Hilirasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang berkelanjutan pada Tahun 2022 adalah 100%.

- SS.8: Dokumen Rancangan Kebijakan yang telah diperjanjikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2022 telah disusun, telah dilaporkan pada Aplikasi Pelaporan Kinerja Kemenko Marves serta telah divalidasi.
- SS.9: Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang telah diperjanjikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2022 telah disusun, telah dilaporkan pada Aplikasi Pelaporan Kinerja Kemenko Marves serta telah divalidasi.
- SS.10: Pada Tahun 2022 telah mengikuti 13 Kegiatan Bimtek Pengembangan Kompetensi Pegawai
- SS.11: Pada Tahun 2022 Nilai SAKIP yang dicapai adalah 75,87 dan Persentase PMPRB yang dicapai adalah 92,51%
- SS.12: Pada Tahun 2022, Nilai IKPA yang dicapai adalah 86,54

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan realisasi target kinerja yang telah dilaksanakan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Besar harapan kami bahwa laporan kinerja yang dilaporkan secara periodik ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pihak yang terkait.